



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 (23 Juni – 11 Juli 2024)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI II	4
A. FUNGSI LEGISLASI	4
B. FUNGSI ANGGARAN	13
C. FUNGSI PENGAWASAN	13
KOMISI III	16
A. FUNGSI LEGISLASI	16
B. FUNGSI ANGGARAN	17
C. FUNGSI PENGAWASAN	17
KOMISI IV	21
A. FUNGSI LEGISLASI	21
B. FUNGSI ANGGARAN	21
C. FUNGSI PENGAWASAN	21

KOMISI V	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	24
C. FUNGSI PENGAWASAN	24
KOMISI VII	26
A. FUNGSI LEGISLASI	26
B. FUNGSI ANGGARAN	26
C. FUNGSI PENGAWASAN	26
KOMISI VIII	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	30
C. FUNGSI PENGAWASAN	30
KOMISI IX	32
A. FUNGSI LEGISLASI	32
B. FUNGSI ANGGARAN	32
C. FUNGSI PENGAWASAN	32
KOMISI X	40
A. FUNGSI LEGISLASI	40

B. FUNGSI ANGGARAN	42
C. FUNGSI PENGAWASAN	42
KOMISI XI	49
A. FUNGSI LEGISLASI	49
B. FUNGSI ANGGARAN	49
C. FUNGSI PENGAWASAN	85
BADAN LEGISLASI	90
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	95
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	106

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>1) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan</p> <p>2) RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan</p> <p>3) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan</p> <p>4) RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan</p>	<p>Rapat Panja Komisi I DPR RI Dengan Tim Panja Pemerintah (Pejabat Eselon I Kemlu, Kemhan, dan Kemkumham) tanggal 24 Juni 2024.</p>	<p>Pembahasan DIM:</p> <p>1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan</p> <p>2. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan</p> <p>3. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan</p> <p>4. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5) RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan		5. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. KEMHAN RI 2. PANGLIMA TNI	Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI menghadirkan KASAD, KASAL, dan KASAU tanggal 10 Juli 2024.	Dalam rangka Pembahasan permohonan persetujuan revisi RKA/K/L UO Kemhan tentang penambahan 23 (duapuluh tiga) kegiatan PDN dalam DIPA tahun 2024	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Lembaga Sensor Film	RDPU pada tanggal 25 – 27 Juni 2024. (Sesi I s.d. Sesi VI)	RDPU Komisi I DPR RI dengan 34 Calon Anggota LSF Periode 2024-2028 dalam rangka Penyampaian visi dan misi. Dilanjutkan dengan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 27 Juni 2024 dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap 17 Calon Anggota Lembaga Sensor Film (LSF), yang terdiri dari 12 unsur masyarakat 5 unsur pemerintah.	
2.	1. KEMKOMINFO RI 2. BSSN	Raker pada tanggal 27 Juni 2024.	Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala BSSN dalam rangka mendapatkan Penjelasan Terkait Perkembangan Penanganan Gangguan Pusat Data Nasional (PDN).	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. TNI 2. BSSN 3. LPP TVRI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LANAL Bandung 2. LPP TVRI Bandung 	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke daerah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bandung, Provinsi Jawa Barat Obyek LANAL, dalam rangka mengetahui Peran Lanal Bandung dalam Pengembangan Potensi maritim Provinsi Jawa Barat sebagai Bentuk Implemetasi OMSP TNI. 2. Bogor, Provinsi Jawa Barat , Obyek BSSN, dalam rangka mengetahui Pelatihan da Simulasi Keamanan Siber untuk Melindungi Kota Pintar dari Serangan <i>Hacker</i>. 3. Serang, Provinsi Banten Obyek TVRI, dalam rangka mengetahui Peran dan Tantangan TVRI Banten dalam Penguatan Siaran Konten Lokal yang Berkualitas di Era Digital. 	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemlu RI 2. Kemenkumham RI 3. Kemnaker RI 4. BP2MI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Protokoler dan Konsuler Kemlu, 2. Dirjen Imigrasi 3. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 4. Kepala BP2MI <p>RDP dilaksanakan tanggal 9 Juli 2024.</p>	<p>RDP Panja Penanganan Pelindungan WNI di Luar Negeri dengan Dirjen Protokoler dan Konsuler Kemlu, Dirjen Imigrasi diwakili oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Dirjen Pembinaan Penempatan diwakili oleh Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kepala BP2MI dalam rangka mendengarkan penjelasan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan strategis Polugri RI dalam penanganan pelindungan WNI di luar negeri. 2. Penguatan tata kelola dan kelembagaan pelindungan WNI. 3. Pemanfaatan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dan terpadu antara K/L terkait. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	26 RUU Kab/Kota (Cluster II)	Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Bupati Bintan, Bupati Lampung Selatan, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lampung Utara, Bupati Batang Hari, Bupati Kerinci, Pj. Bupati Merangin, Walikota Jambi, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Kampar, dan Walikota Pekanbaru, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (Dua Puluh Enam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 3 kabupaten yang menerima rumusan dalam draft RUU kab/kota yaitu: Kabupaten Bintan, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Utara. 2. Masukan terhadap RUU Kabupaten/Kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Lampung Tengah: Way Pengabuan menjadi Way Pangubuan b. Kabupaten Bengkalis: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 30 Juli berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 20 Tahun 2004 - Tidak ada pegunungan dan perbukitan c. Kabupaten Kampar: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya dikelilingi gugusan Bukit Barisan, tidak ada pegunungan - Kecamatan Bangkinang Kota d. Kota Pekanbaru: <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyebutkan secara rinci nama kecamatan - Perubahan tanggal hari jadi e. Kota Jambi: Tanggal hari jadi 23 Mei diubah menjadi 28 Mei f. Kabupaten Merangin: 	Pembahasan.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		RUU tentang Kabupaten/Kota, hari Senin, 24 Juni 2024.	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Sungai Tenang berubah menjadi Kecamatan Jangkat Timur - Tanggal 22 Desember berdasarkan peraturan daerah - Penambahan karakteristik diatur melalui peraturan daerah (disebutkan dalam norma RUU) g. Kabupaten Kerinci: <ul style="list-style-type: none"> - Penulisan Kecamatan Bukit Kerman (dipisah) - UU No. 12 Tahun 1956 diganti dengan UU No. 58 Tahun 1958 h. Kabupaten Batang Hari: <ul style="list-style-type: none"> - Penulisan Batang Hari (dipisah) - Penambahan potensi pertanian dan peternakan - Tidak punya desa adat - Penulisan titik koordinat wilayah pada norma RUU i. Kabupaten Indragiri Hulu: <ul style="list-style-type: none"> - Nama Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Kabupaten Indragiri - Tanggal 19 Maret 1956 berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2023. <p>3. Masukan dari kepala daerah akan dibahas pada RDP Panja dengan Pemerintah.</p>	
2.	26 RUU Kab/Kota (Cluster II)	Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 1 kabupaten yang menerima rumusan dalam draft RUU kab/kota yaitu: Kabupaten Solok. 2. Terdapat 2 kabupaten yang tidak hadir yaitu: Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung. 	Pembahasan.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Komite I DPD RI, Bupati Lima Puluh Kota, Bupati Agam, Bupati Padang Pariaman, Bupati Pasaman, Bupati Pesisir Selatan, Bupati Sijunjung, Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Walikota Bukittinggi, Walikota Padang Panjang, Walikota Padang, Walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Sawahlunto, dan Walikota Solo, dengan agenda mendapatkan masukan terkait pembahasan 26 (Dua Puluh Enam) RUU tentang Kabupaten/Kota, hari Senin, 24 Juni 2024.</p>	<p>3. Terdapat 11 kab/kota yang pada prinsipnya menerima draft RUU kab/kota dengan beberapa catatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Lima Puluh Kota: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 13 April 1841 berdasarkan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota - Pemekaran Kabupaten Lima Puluh Kota - Penambahan pada pasal 3 yaitu “Batas wilayah diatur dalam permendagri” - Ibukota di Kecamatan Sarilamak b. Kabupaten Agam: <ul style="list-style-type: none"> - Dirayakan 15 Januari 1665, tetapi belum ada catatan terkait hari jadi - Ibukota di Lubuk Basung c. Kabupaten Pasaman: <ul style="list-style-type: none"> - Batas wilayah sebelah utara yaitu Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Mandailing Natal - Tanggal 8 Oktober berdasarkan Keputusan Bupati d. Kabupaten Pesisir Selatan: <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan ranah pesisir berubah menjadi ranah pasisia - Kecamatan Batang Kapas berubah menjadi Batang Kapeh 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berubah menjadi Kecamatan Bayang utara - Kecamatan air pura berubah menjadi kecamatan aiapura - Kecamatan IV jurai berubah menjadi Kecamatan ampek jurai - Painan Kecamatan Ampek Jurai e. Kabupaten Tanah Datar: <ul style="list-style-type: none"> - Batas wilayah diatur lebih lanjut dengan permendagri - Usul pemekaran Provinsi Sumatera Barat - Tidak mengatur hari jadi berdasarkan perda - Karakteristik daerah diatur dengan f. Kota Bukittinggi: Hari jadi 22 Desember 1784 g. Kota Padang Panjang: Tanggal 1 Desember 1790 berdasarkan perda Kota Padang Panjang No. 17 Tahun 2004. h. Kota Padang: Tanggal 7 Agustus 1669 berdasarkan SK Walikota i. Kota Payakumbuh: Hari Jadi Tanggal 17 Desember 1970 j. Kota Sawah Lunto: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 1 Desember berdasarkan perda No. 1 tahun 2004 - ditambahkan frasa “keberagaman budaya” setelah frasa situs budaya. k. Kota Solok: 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengingat ditambahkan UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat - Hari ulang tahun tanggal 16 Desember - Potensi Sumberdaya alam pertanian (beras solok) - Penambahan “adat basandi syarak syarak basandi kitabullah,” “syarak mangatur adat mamakai” di seluruh RUU kab/kota Provinsi Sumatera Barat <p>4. Masukan dari kepala daerah akan dibahas pada RDP Panja dengan Pemerintah.</p>	
3.	26 RUU Kab/Kota (Cluster II)	Rapat Dengar Pendapat Panja Pembahasan 26 (Dua Puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Komite I DPD RI, dengan agenda pembahasan DIM 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, di Provinsi Lampung, di Provinsi Jambi, di Provinsi Riau dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian hanya pada dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota, tanpa membahas kewenangan lain yang mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. 2. Tanggal pembentukan berdasarkan UU lama tetap dicantumkan, sedangkan hari jadi diatur oleh peraturan daerah. 3. Nama kecamatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan). 4. Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dicantumkan kembali. 	Pembahasan.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		di Provinsi Sumatera Barat, hari Selasa, 25 Juni 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Konsistensi Lembaran Negara. Hanya dicantumkan pada ketentuan mengingat, Pasal 2 (tanggal pembentukan), dan ketentuan penutup. 6. Nama-nama kabupaten yang berubah dicantumkan dalam Penjelasan Umum, tidak dalam Batang Tubuh RUU. Perubahan nama kabupaten di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Bintan (dulu Kabupaten Kepulauan Riau) berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006. • Kabupaten Merangin (dulu Kabupaten Sarolangun Bangko) berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999. • Kabupaten Pesisir Selatan (dulu Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci) berdasarkan UU No. 58 Tahun 1958. • Kabupaten Sijunjung (dulu Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung) berdasarkan PP No. 25 Tahun 2008. 7. Panja menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang terdiri dari Komisi II DPR RI, perwakilan Komite I DPD RI dan Pemerintah dari Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkeu, dan Bappenas untuk melanjutkan pembahasan serta merumuskan dan mensinkronisasi terkait pasal-pasal yang bersifat substantif hingga selesai seluruh DIM RUU 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota. 	
4.	26 RUU Kab/Kota (Cluster II)	Rapat Dengar Pendapat Timus/Timsin Panja Pembahasan 26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panja menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk merumuskan, mensinkronkan, serta 	Pembahasan.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>(Dua Puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Komite I DPD RI, dengan agenda melanjutkan pembahasan DIM 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, di Provinsi Lampung, di Provinsi Jambi, di Provinsi Riau dan di Provinsi Sumatera Barat, hari Selasa, 25 Juni 2024.</p>	<p>menyempurnakan pasal-pasal dalam 26 RUU Kabupaten/Kota. Rapat ini adalah tindak lanjut dari keputusan sebelumnya, dengan fokus khusus pada penyempurnaan substansi dan konsistensi pasal-pasal dalam RUU. Penyempurnaan ini dilakukan sesuai dengan rekapitulasi 26 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kabupaten/Kota dari pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam rapat Timus dan Timsin, perwakilan pemerintah menolak usulan perubahan nama Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Kabupaten Indragiri. Hal ini dikarenakan nama "Kabupaten Indragiri Hulu" sudah tercantum dalam Pasal 3 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau. Untuk itu, perubahan nama Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Kabupaten Indragiri akan dibahas dan diputuskan dalam rapat Panja pada hari Kamis, 27 Juni 2024. Hal ini di luar kewenangan Rapat Timus dan Timsin untuk memutuskan. 3. Selanjutnya sesuai penugasan Panja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi merapikan kembali draft akhir RUU 26 Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup, sistematika dan materi muatan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk RUU Kabupaten: 3 BAB dan 10 Pasal, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ BAB I: Ketentuan Umum (2 Pasal) 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Definisi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. • Tanggal pembentukan kabupaten sesuai UU awal pembentukannya. ✓ BAB II: Cakupan Wilayah, Batas Daerah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten (4 Pasal) <ul style="list-style-type: none"> • Nama dan jumlah kecamatan. • Batas daerah. • Ibu kota kabupaten. • Karakteristik kabupaten. ✓ BAB III: Ketentuan Penutup (4 Pasal) <ul style="list-style-type: none"> • Berisi ketentuan penutup. ➤ Untuk RUU Kota: 3 BAB dan 9 Pasal, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ BAB I: Ketentuan Umum (2 Pasal) <ul style="list-style-type: none"> • Definisi provinsi, kota, dan kecamatan. • Tanggal pembentukan kota sesuai UU awal pembentukannya. ✓ BAB II: Cakupan Wilayah, Batas Daerah, dan Karakteristik Kota (3 Pasal) <ul style="list-style-type: none"> • Nama dan jumlah kecamatan. • Batas daerah. • Karakteristik kota. ✓ BAB III: Ketentuan Penutup (4 Pasal) <ul style="list-style-type: none"> • Berisi ketentuan penutup. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	26 RUU Kab/Kota (Cluster II)	Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Keuangan RI, dengan agenda pengantar ketua rapat, laporan Panja 26 RUU tentang Kabupaten/Kota ke Raker TK. I, penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan draf 26 RUU Kab/Kota, pada hari Kamis, 27 Juni 2024.	Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pekan Baru di Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan	Pembahasan

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Undang-Undang tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, dan Rancangan Undang-Undang tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • KBRI Roma • Kementerian Dalam Negeri Italia 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. 	Mendapatkan masukan terkait Disain ideal sistem Pemilihan Umum di Indonesia.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Kunjungan kerja luar negeri ke negara Italia tanggal 30 Juni – 6 Juli 2024.		
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kantah Surabaya I dan II • Kantah Sidoarjo 	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Kunjungan kerja spesifik ke Surabaya tanggal 1 – 3 Juli 2024.</p>	Terkait pertanahan.	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • KBRI Roma • WFD • KPU 	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Kunjungan kerja luar negeri ke negara Inggris tanggal 7 – 13 Juli 2024.</p>	Mendapatkan masukan terkait Disain ideal sistem Pemilihan Umum di Indonesia.	
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah • KPU • Bawaslu 	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p>	Terkait Persiapan Tahapan Pilkada Serentak 2024.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan kerja spesifik ke Kota Solo tanggal 1 – 3 Juli 2024.		

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Penyusunan RUU tentang Penyadapan	---	Sesuai dengan hasil rapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 13 November 2023, bahwa Tim BKD akan merevisi kembali RUU tentang Penyadapan berdasarkan masukan Anggota Komisi III DPR RI.	RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI.
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemberantasan Terorisme (TPPT)	---	Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 Januari 2023.	Amanat Pasal 43J UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3.	Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan <i>RUU tentang HAPER</i>)	---	Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper.	
4.	Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan <i>RUU tentang Narkotika</i>)	---	Komisi III masih menunggu revisi draf RUU tentang Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf RUU tersebut akan disampaikan kepada masing-masing fraksi untuk dipelajari.	
5.	Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan <i>RUU tentang Mahkamah Konstitusi</i>)	Pengambilan Keputusan Tk I RUU tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Mei 2024.	Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menkopolkumham dan Menkumham dalam hal ini diwakilkan oleh Dirjen PP Kemenkumham dengan agenda Pengambilan Keputusan Tk. I pada tanggal 13 Mei 2024, dan memutuskan Pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada Pembahasan Pengambilan Keputusan Tk. II dalam Rapat Paripurna.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Saat ini Komisi III DPR RI masih menunggu penjadwalan Pembahasan Pengambilan Keputusan Tk II RUU tentang Mahkamah Konstitusi di Rapat Paripurna.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Raker Komisi III DPR RI dengan LPSK dilaksanakan hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, membahas: 1. Evaluasi kinerja dan capaian LPSK tahun 2023, 2. Rencana kerja LPSK tahun 2024 dan strategi pencapaiannya. 3. Tindak lanjut Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 10 Januari 2023 terkait Program Penguatan Mekanisme Nasional dan Program Optimalisasi Pemulihan Korban Pelanggaran HAM yang berat masa lalu.	Kesimpulan : 1. Komisi III DPR RI mendukung capaian kinerja LPSK pada tahun 2023, Rencana Kerja dan Program Prioritas LPSK di tahun 2024 serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. 2. Komisi III DPR RI meminta LPSK untuk memprioritaskan Program Layanan Penerimaan dan penelaahan permohonan Saksi dan Korban yang berkualitas serta Program Pemenuhan hak Saksi dan Korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Komisi III DPR RI meminta LPSK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, penambahan Kantor Perwakilan LPSK secara bertahap, efektivitas pelayanan perlindungan dan efektivitas pelibatan masyarakat melalui Sahabat Saksi dan Korban (SSK) serta Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, dan Kementerian/Lembaga/Daerah serta pemangku kepentingan terkait.	
2.	Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Raker Komisi III DPR RI dengan PPATK dilaksanakan hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, membahas: 1. Evaluasi kinerja dan capaian PPATK Semester I tahun 2024.	Kesimpulan : 1. Komisi III DPR RI mendukung PPATK dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>2. Evaluasi kinerja <i>Collaborative Analysis Team</i> selama Pemilu 2024 dan transaksi-transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024.</p>	<p>untuk peningkatan indeks kredibilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendorong PPATK untuk terus mengawasi, menelusuri, dan memantau tindak lanjut penegakan hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana, khususnya judi <i>online</i>, korupsi, narkoba, dan lainnya.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk mengoptimalkan peran <i>Collaborative Analysis Team</i> (CAT) PPATK dalam mengawasi dan menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses Pemilu 2024, termasuk Pilkada 2024.</p> <p>4. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk terus menelusuri lebih jauh terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait judi <i>online</i>, termasuk keterlibatan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aparat penegak hukum, dan menyampaikannya kepada Komisi III DPR RI.</p>	
3.	<p>Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</p>	<p>Raker Komisi III DPR RI dengan BNPT dilaksanakan hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, membahas:</p> <p>1. Evaluasi kinerja dan capaian BNPT tahun 2023 serta rencana kerja dan target capaian BNPT tahun 2024.</p> <p>2. Evaluasi Kerja sama di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme serta Pelindungan terhadap Korban Evaluasi kinerja dan capaian BNPT tahun 2023 serta rencana kerja dan target capaian BNPT tahun 2024.</p>	<p>Kesimpulan :</p> <p>1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan capaian kinerja BNPT tahun 2023 dan Rencana Kerja, Program Prioritas dan Target Pencapaian BNPT di tahun 2024.</p> <p>2. Komisi III DPR RI mendukung Kepala BNPT untuk terus melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan pengaruh positif terhadap proses Kontra Radikalisasi baik melalui dunia maya maupun Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 38 Provinsi di Indonesia.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNPT agar terus meningkatkan pola koordinasi dan konsolidasi baik di dalam dan luar negeri dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga Akademik dan Universitas, Lembaga Riset, Organisasi Keagamaan, Negara Mitra, Lembaga Regional, dan Lembaga Internasional, serta turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit paham radikal-terorisme.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi III DPR RI mendukung perubahan SOTK BNPT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang agar tugas-tugas penanggulangan terorisme dapat lebih optimal baik didalam maupun luar negeri.</p>	
4.	<p>Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p>	<p>Raker Komisi III DPR RI dengan KPK dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja KPK di semester I tahun 2024. 2. Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM KPK. 	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung KPK dalam mengoptimalkan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai fokus area, termasuk peningkatan tata kelola layanan publik, sumber daya alam serta keberlangsungannya, dan meningkatkan Integritas Nasional di seluruh sektor melalui program dan kegiatan yang efektif dan inovatif. 2. Komisi III DPR RI meminta Pimpinan KPK agar meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian maupun koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya kasus-kasus korupsi besar dan strategis, serta mengoptimalkan pengembalian/pemulihan aset negara. 3. Komisi III DPR RI meminta Pimpinan KPK untuk meningkatkan manajemen Sumber Daya Manusia dan pengawasan internal, serta meningkatkan kolaborasi yang sinergis bersama Dewan Pengawas, untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas seluruh insan KPK serta penerapan <i>good governance</i>. 	
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolda Sulawesi Selatan 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 3. Kakanwil Sulawesi Selatan Kemenkumham. 	<p>Kunker Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 sd 5 Juli 2024.</p>	<p>Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan mitra kerja di daerah dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, khususnya terkait pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> (RJ) dan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mauridson Hutagalung selaku Kuasa Hukum dari Djoko Pustoko Onggo Hartono dkk; 2. H. Makawi bin H. Abdul Halim 	<p>Pada tanggal 10 Juli 2024, Komisi III DPR RI melaksanakan RDPU dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mauridson Hutagalung selaku Kuasa Hukum dari Djoko Pustoko Onggo Hartono dkk, membahas mengenai adanya dugaan penyalahgunaan jabatan/wewenang administrasi penyelidikan dan/atau penyidikan oleh Kombes Pol. F.X. Endriadi, S.I.K. selaku Penyidik dalam penanganan perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/0890/XI/2022/SPKT/Polda DI Yogyakarta tanggal 20 November 2022; 2. H. Makawi bin H. Abdul Halim membahas mengenai permasalahan sengketa tanah dengan PT. Summarecon. 	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi DI Yogyakarta, dan akan melakukan pertemuan dengan Kapolda DI Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut salah satu pembahasannya yaitu mengenai hasil putusan perkara sengketa kepemilikan sertifikat tanah dan dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan serta penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penyidik dalam proses penyidikan. 2. Komisi III DPR RI akan menyampaikan surat kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait dengan putusan perkara yang diberikan para hakim atas kasus sengketa tanah H. Makawi dengan PT. <i>Sumarecon</i>. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 9 Juli 2024.	Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; 2. Ketua Perwakilan Tambak Udang/Paguyuban Petambak Mulyo Karimunjawa; 3. Ketua Umum Shrimp Club Indonesia; 4. Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia; 5. Ketua Umum Forum Udang Indonesia 	Audiensi dilaksanakan Senin, 24 Juni 2024.	Permasalahan Tambak Udang di Karimunjawa	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 2. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; serta 4. Kepala Badan Karantina Indonesia 	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada Kamis, 21 Juni 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arah dan Kebijakan Tata Kelola Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 2. Peralihan Aset Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Indonesia. 	-
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kab. Bantul; 2. Kementerian Pertanian; 3. Bapanas; 4. Perum BULOG; 5. ID FOOD; dan 6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. D.I.Y. 7. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia 	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Bantul Provinsi DIY dilaksanakan pada 1 Juli s.d 3 Juli 2024.	Kunjungan ke Gudang Bulog GBB Sendangsari, Kunden, Sendangsari, Kec. Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY serta Diskusi mengenai Penyerapan Gabah Petani untuk Menjaga <i>Stock</i> Pangan di Provinsi DIY.	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi DIY; 2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; 3. Kementerian Pertanian; 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY; 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY; 7. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo; 8. PT Pupuk Indonesia; 	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I.Yogyakarta dilaksanakan pada 1 Juli s.d 3 Juli 2024.	Peninjauan dan Diskusi tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Perhutanan Sosial) menjadi Lokasi Wisata dan Pengolahan Hasil Hutan yang Ramah Lingkungan melalui Pengembangan Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi di Lokasi Hutan Kemasyarakatan Kalibiru, Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	9. ID FOOD ; 10. Direksi PT Perum Perhutani ; 11. Perwakilan Petani Hutan Perhutanan Sosial .			
5.	1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ; 2. Pemerintah Kabupaten Kebumen ; 3. Kementerian Pertanian ; 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan ; 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; 6. Badan Pangan Nasional ; 7. Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng ; 8. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ; 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ; 10. Perum Bulog ; 11. PT Pupuk Indonesia (Persero) ; 12. Perum Perhutani ; 13. Perwakilan Penggiling Padi Kebumen ; 14. Pembudi Daya Udang di BUBK Kab. Kebumen	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada 1 Juli s.d 3 Juli 2024.	1. Peninjauan dan Diskusi terkait Penyerapan Gabah Produksi Petani dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Gudang Bulog Selang Kebumen; 2. Peninjauan sekaligus Panen Udang dan Diskusi terkait Program Nasional Budi Daya Udang di Kabupaten Kebumen; 3. Peninjauan dan Diskusi terkait Pengelolaan Wisata Sagara <i>View of Karangbolong</i> .	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PUPR (Ditjen BM, Ditjen SDA, Ditjen CK, Ditjen Perumahan, Ditjen Bikon dan BPIW) 2. Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud, Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, dan Ditjen KA) 3. BMKG 4. BNPP/ Basarnas 5. Badan Otorita IKN 	Kunsfik dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Juli 2024.	Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka meninjau <i>progress</i> Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN), ke: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Balikpapan 2. Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Kabupaten Penajam Paser 	
2.	Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	RDP dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024.	Membahas Pengelolaan Terminal Tipe A diseluruh Indonesia dan Sistem manajemen tiket dan Penumpukan kendaraan di pelabuhan penyeberangan.	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PUPR (Ditjen Bina Marga, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Cipta Karya, Ditjen SDA, BPIW) 2. Kementerian Perhubungan (Ditjen 	Kunsfik dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Juli 2024.	Kunjungan Kerja Spesifik ke : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan Peti Kemas Soekarno Hatta, Kota Makasar 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Hubla, dan PT Pelindo, PT Peln)		2. Pembangunan Jalan dan Jembatan <i>Bypass</i> Mamminasata, Kabupaten Maros 3. Bendungan Jenelata, Kabupaten Gowa.	
4.	Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.	Audiensi Dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024.	Dalam rangka Kunjungan Kerja dan Silaturahmi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Energi Baru dan Energi Baru Terbaruan	Rapat Panja RUU EBET dengan Pemerintah dan DPD Dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB.	Lanjutan pembahasan RUU EBET	
2.		Rapat Panja RUU EBET dengan Pemerintah dan DPD dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024'pukul 10.00 WIB.		

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII	Kunsfik dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Juli 2024.	Kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke: a. PT Kapuas Prima <i>Coal</i> dan Kawasan Industri Citra Borneo Indah (CBI Group) di Kalimantan Tengah. b. Plant Coca Cola <i>Europacific Partners</i> di Bekasi Provinsi Jawa Barat. c. Peninjauan ke Lpangan Pertamina EP Sukowati Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.	
2.	Direktur Utama PT KFI	RDPU dengan agenda Tindak lanjut hasil kunjungan kerja	Hasil pembahasan: Rapat dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI ditunda dikarenakan Direktut PT Kalimantan Ferro Industy tidak hadir.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 14.00 WIB.		
3.	Menteri ESDM RI (Selaku Ketua Harian DEN)	Raker Dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 14.00 WIB, dengan agenda: 1. Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN); 2. Pandangan Fraksi; 3. Penetapan Jadwal Pembahasan; 4. Lain-lain.	Hasil pembahasan: 1. Komisi VII DPR RI melalui pendapat dari masing-masing fraksi: a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan b. Partai Golongan Karya c. Partai Nasdem d. Partai Kebangkitan Bangsa e. Partai Demokrat f. Partai Keadilan Sejahtera g. Partai Amanat Nasional h. Partai Persatuan Pembangunan Menyepakati untuk dilakukan pembhasan lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) Catatan: Fraksi Partai Gerindra tidak hadir 2. Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM RI (Ketua Harian DEN) menyepakati agenda pembahasan RPP KEN dilakukan pada masa reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 3. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor Bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
4.	Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI	RDP Dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 13.00 WIB, dengan agenda:	1. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk merancang terobosan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sektor	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Terkait Permasalahan Terpuruknya Industri Tekstil Nasional. 2. Penjelasan tentang Kondisi Industri Farmasi Nasional Terkini. 	<p>industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Farmasi khususnya terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ketergantungan atas bahan baku impor. b) Daya saing, baik kualitas maupun harga produk. c) Tingginya volume impor TPT dan impor ilegal. <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi VII DPR RI mendorong Plt. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk memaksimalkan kinerja industri TPT dalam mendukung kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, ekspor manufaktur, penyerapan tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri. 3. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk mendorong pertumbuhan industri Bahan Baku Obat (BBO) dalam negeri dalam rangka menurunkan ketergantungan impor terhadap BBO. 4. Komisi VII DPR RI mendesak kepada Plt. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI agar mendorong industri farmasi dalam negeri untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya melalui penggunaan BBO dalam negeri. 5. Komisi VII DPR RI mendorong kepada Plt. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk menguatkan kerja sama dengan BRIN dalam rangka meningkatkan teknologi pada industri TPT dan farmasi dalam negeri. 6. Komisi VII DPR RI meminta Plt. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 16 Juli 2024. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)	RDPU Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB, dengan agenda Pembahasan Terkait Permasalahan Terpuruknya Industri Tekstil Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VII DPR RI dapat memahami paparan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri dan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pemerintah agar Pemerintah membuat aturan atau regulasi secara lebih protektif khususnya terhadap produk impor TPT dalam negeri dalam rangka menguatkan industri TPT di dalam negeri. 2. Komisi VII DPR RI akan mendalami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri TPT khususnya terkait perbedaan nilai kuota ekspor Tiongkok ke Indonesia dengan nilai kuota Impor Indonesia dari Tiongkok melalui panja pengawasan Impor Bahan Baku Industri (IBBI) Komisi VII DPR RI 3. Komisi VII DPR RI meminta Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 17 Juli 2024. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI	RDP Komisi VIII DPR RI tanggal 3 Juli 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian kinerja BPJPH tahun 2024, sampai dengan 2 Juli tahun 2024, dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a. Serapan anggaran yang mencapai 64,88 persen dari Pagu Anggaran Tahun 2024 yang sebesar Rp340.677.831.000,- (<i>tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>). b. Kinerja sertifikasi halal <i>self declare</i> yang mencapai 847.258 produk dari target 1.000.000 produk dan sertifikasi halal reguler 8.318 yang mencapai 232.127 produk. 2. Komisi VIII DPR RI meminta BPJPH agar menyampaikan laporan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang diperoleh dari proses penerbitan sertifikat halal produk kepada Komisi VIII DPR RI. 3. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BPJPH Kementerian Agama RI, agar dalam pelaksanaan jaminan produk halal dapat menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Mempercepat penerbitan sertifikat halal produk yang telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan. b. Mempercepat sertifikasi halal <i>self declare</i> bagi produk yang diproduksi oleh UMK melalui kemudahan prosedur yang disosialisasikan secara aktif dan masif kepada pelaku usaha. c. Memastikan produk impor yang beredar di Indonesia bersertifikat halal melalui peningkatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. d. Memastikan infrastruktur digital BPJPH aman dan mudah diakses sehingga mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal produk. e. Memastikan bahwa rumah pemotongan hewan yang beroperasi di Indonesia bersertifikat halal dan melakukan pengawasan secara periodik. f. Mengupayakan untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) halal Indonesia di lembaga halal luar negeri yang bekerja sama dengan BPJPH. g. Memperkuat kapasitas kelembagaan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baik sebagai regulator maupun operator. 	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik	Melakukan kunjungan pengawasan ke Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman pada 6-8 Juli 2024.	Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana.	-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) pada Selasa, 25 Juni 2024.	Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM).	
2.		Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) pada Selasa, 2 Juli 2024.	Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM).	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rapat Panja mengenai Pengawasan terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat pada Senin, 24 Juni 2024, dengan agenda:	Panja Komisi IX DPR RI mengenai Panja mengenai Pengawasan terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat telah mendapat Penjelasan dari Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>Badan Pengawas Obat dan Makanan;</p> <p>3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;</p> <p>4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI;</p> <p>5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI;</p> <p>6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI;</p> <p>7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenahan sistem keamanan dan mutu obat; 2. Penjelasan terkait arah kebijakan pengawasan keamanan dan mutu obat; 3. Penguatan pembinaan dan pengawasan peredaran obat; 4. Penjelasan terkait pemenuhan kebutuhan bahan baku obat dan jaminan keamanan dan mutunya; serta 5. Penjelasan terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menuju kemandirian industri farmasi agar pemenuhan kebutuhan obat dalam negeri terpenuhi. 	<p>Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat dalam menyusun laporan akhir Panja.</p>	
2.	<p>Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan</p>	<p>Audiensi terkait penolakan Tapera pada Selasa, 25 Juni 2024.</p>	<p>Komisi IX DPR RI mengapresiasi dan menerima masukan dari Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, masukan tersebut akan menjadi bahan Komisi IX DPR RI pada saat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja terkait.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kunjungan Kerja Spesifik Komsis IX DPR RI	Kunjungan Kerja Spesifik Komsis IX DPR RI pada Rabu s.d. Kamis, 26 s.d. 28 Juni 2024 ke: 1. Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 2. Kepulauan Riau Provinsi Kepri 3. Kab. Kulonprogo Provinsi DIY	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Terkait Pengawasan dan Evaluasi Pelindungan Jaminan Sosial Pekerja.	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI; 2. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 4. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI; 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI; 6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS); 7. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS. 	Rapat Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan terhadap Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula Garam Lemak (GGL) pada Senin, 1 Juli 2024, dengan agenda: 1. Penjelasan terkait arah kebijakan pembatasan konsumsi Gula Garam Lemak (GGL) di masyarakat; 2. Penguatan pengawasan konsumsi Gula Garam Lemak di masyarakat.	Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula Garam Lemak (GGL) telah mendapat Penjelasan dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula Garam Lemak (GGL) dalam menyusun laporan akhir Panja.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan RI	<p>Rapat Dengar Pendapat pada Selasa, 2 Juli 2024, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh terdampak PHK di berbagai daerah; 2. Penyelesaian atas kasus-kasus klaim peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 3. Evaluasi terhadap perlindungan Jaminan sosial ketenagakerjaan, serta capaian target kepesertaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan pekerja/buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor; b. penyelesaian klaim jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta yang masih terkendala masalah administrasi dan manajemen; c. koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri; d. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan terobosan sosialisasi diberbagai daerah. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian: <ol style="list-style-type: none"> a. implementasi hasil pengawasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan; b. pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memperoleh Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berdasarkan kepesertaannya. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini, selambat-lambat tanggal 9 Juli 2024.</p>	
6.	<p>1. Menteri Kesehatan RI; 2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.</p>	<p>Rapat Kerja pada Rabu, 3 Juli 2024, dengan agenda membahas strategi peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi tenaga Kesehatan, tenaga medis secara merata di seluruh Indonesia, termasuk dokter spesialis melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.</p>	<p>1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI melakukan percepatan penyelesaian seluruh regulasi untuk pelaksanaan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit (<i>Hospital Based</i>) paling lambat akhir bulan Juli 2024, khususnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penugasan 6 (enam) Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) dan penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit (<i>Hospital Based</i>); b. penerbitan Surat Keputusan Bersama Panitia Seleksi Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Universitas (<i>University Based</i>) dan Berbasis Rumah Sakit (<i>Hospital Based</i>); dan c. penerbitan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit. <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI agar melakukan percepatan penyelesaian peta jalan kebutuhan dan pemenuhan dokter spesialis dan sub-spesialis melalui jalur Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Universitas (<i>University Based</i>) dan Berbasis Rumah Sakit (<i>Hospital Based</i>), sesuai dengan prioritas nasional.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan Teknologi RI memperkuat koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) agar mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas.</p> <p>4. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI memprioritaskan pemenuhan mutu, akreditasi, standar dan kualitas di seluruh prodi Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Universitas (<i>University Based</i>) dan Berbasis Rumah Sakit (<i>Hospital Based</i>).</p> <p>5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat kerja hari ini paling lambat tanggal 9 Juli 2024.</p>	
7.	<p>1. Pengurus Ikatan Dokter Indoneia (IDI); 2. Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI); 3. Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI); 4. Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), diwakili oleh Dedi Supratman, SKM, MKM (Ketua Umum IAKMI);</p>	<p>Rapat Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula Garam Lemak (GGL) pada Kamis, 4 Juli 2024 dengan agenda masukan untuk perbaikan arah kebijakan pembatasan konsumsi Gula, Garam dan Lemak di masyarakat.</p>	<p>Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula Garam Lemak (GGL) telah mendapat Penjelasan dari Perhimpunan Ikatan Dokter Indoneia (IDI), Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Perhimpunan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan dan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)		Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula Garam Lemak (GGL) dalam menyusun laporan akhir Panja.	
8.	Menteri Kesehatan RI	Rapat Kerja pada Senin, 8 Juli 2024 dengan agenda penjelasan terkait perkembangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI bersama dengan Kementerian Kesehatan RI akan mendalami substansi seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) melalui Diskusi Kelompok Terarah (DKT/FGD) terhadap isu-isu khusus yang akan disepakati bersama. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan segala upaya dalam rangka mempercepat pengesahan RPP, RPerpres, dan RPMK terkait UU Kesehatan. 3. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI di dalam Rapat Kerja hari ini, paling lambat diserahkan pada tanggal 15 Juli 2024 	
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan (ISMKI) 2. Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia (ILMIKI) 3. Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) 4. Pengurus Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia (ILMAGI) 	Audiensi pada Selasa, 9 Juli 2024 terkait masukan terhadap peraturan Undang-Undang No. 17 tentang Kesehatan.	Komisi IX DPR RI Menerima masukan yang disampaikan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan (ISMKI), Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia (ILMIKI), Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI), Pengurus Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia (ILMAGI) dan Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (IMATELKI) akan menjadi bahan dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (IMATELKI)			
10.	Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dirjen Linjamsos Kemensos RI, Dirjen Paud, Pend. Dasar, Pend. Menengah Kemendikbudristek RI, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI	Rapat Panja Komisi IX DPR pada Selasa, 9 Juli 2024 mengenai Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dengan agenda: 1. Kebijakan dan Program Percepatan penurunan <i>Stunting</i> (termasuk Intervensi Spesifik dan Sensitif) 2. Anggaran percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di setiap Kementerian/ Lembaga. 3. Evaluasi Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Indonesia hingga saat ini. 4. Kampanye Perubahan Perilaku.	Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> telah mendapat Penjelasan dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI Mengenai Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam menyusun laporan akhir Panja.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi X DPR RI menyerap aspirasi ke Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sumatera Utara tanggal 28—30 Juni 2024.	<ul style="list-style-type: none"> • Kunker Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi X DPR RI ke Poltekpar Bali mendapatkan berbagai pandangan dan masukan, antara lain dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyampaikan perlunya peningkatan peranan masyarakat lokal, pengaturan keamanan dan kenyamanan wisatawan, promosi berbasis budaya dan tradisi lokal, partisipasi sektor swasta, dan transparansi serta akuntabilitas dana pariwisata. Adapun Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali menyampaikan agar dalam perijinan kepariwisataan melalui OSS, sektor kepariwisataan masuk dalam kategori berisiko tinggi dan bukan yang berisiko rendah. Selain itu, perlu ditekankan juga agar adanya standar yang jelas mengenai pembentukan desa wisata, jangan sampai menjadi komoditas politik. Sementara Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali menyampaikan agar sertifikasi bagi pramuwisata dilakukan dengan baik dan tidak sekadar proses semata yang tidak memberikan manfaat bagi kompetensi para pramuwisata. • Kunker Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi X DPR RI ke Universitas Ciputra Surabaya mendapatkan pandangan dan masukan, antara lain dari Akademisi Univesitas Ciputra, bahwa perubahan arah pengembangan <i>mass tourism</i> ke <i>quality tourism</i>, membutuhkan banyak cerita budaya dan alam lokal yang dikenali, dilestarikan dan disajikan dalam bentuk produk dan layanan wisata, sekaligus membutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam memahami <i>quality tourism</i>. Permasalahan pariwisata yang mengemuka dalam rapat menyoroti kebijakan kepariwisataan, antara lain perlunya evaluasi 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kebijakan perizinan yang sering berubah-ubah dan terlalu banyak variasi izin untuk pengelolaan hotel seperti perizinan penggunaan air. Untuk kepentingan pengembangan pariwisata sebaiknya regulasi perizinan yang berkaitan dengan pariwisata perlu disinergikan, diintegrasikan dan disederhanakan. Substansi tersebut perlu masuk dalam RUU tentang Kepariwisata. Pengelolaan pariwisata yang memperhatikan lingkungan harus menjadi standar penting untuk keberlanjutan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunker Panja RUU tentang Kepariwisata Komisi X DPR RI ke Poltekpar Medan mendapatkan masukan dari beberapa pelaku pariwisata yang menyampaikan beberapa poin, antara lain perlunya Ripparnas (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional) disusun secara <i>bottom-up</i> dari daerah, adanya perbaikan regulasi terkait sertifikasi bagi sumber daya pariwisata, perlunya keberpihakan kepada pramuwisata, pentingnya kurikulum sekolah yang memperkenalkan pariwisata sejak dini, dan poin penting lain. Pramuwisata, meminta adanya perlindungan yang pasti bagi mereka dalam RUU tentang Kepariwisata dan perlunya aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, yang benar-benar mendukung kepentingan mereka. Masukan lainnya adalah terkait bidang usaha pariwisata yang juga diatur oleh UU Cipta Kerja, sehingga perlu diselaraskan. Diusulkan pula, agar <i>online travel agency</i>, diatur izinnnya dalam RUU tentang Kepariwisata maupun dalam aturan turunannya. Sedangkan Poltekpar Medan, menyampaikan usulan, di antaranya terkait penyediaan anggaran bagi riset bidang pariwisata di masing-masing tingkat (level) pemerintahan. Riset pariwisata membutuhkan biaya besar, dan rata-rata pemerintah daerah tidak menganggarkan dana. Riset yang umumnya dilakukan oleh tingkat pusat, tidak menjamin hasil yang sesuai dengan kondisi pariwisata di daerah. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.		Tanggal 8 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB dan Pukul 13.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Badan Legislasi DPR RI. - Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata untuk diserahkan kembali kepada Komisi X DPR RI dan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	-
3.		Rapat Intern Panja RUU tentang Kepariwisata Komisi X DPR RI tanggal 8 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB.	Rapat Tertutup.	
4.		Tanggal 9 Juli 2024.	Sidang Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) Komisi X DPR RI tanggal 24—26 Juni 2024.	Diskusi yang mengemuka antara dengan para pemangku kepentingan pendidikan membahas mengenai pemenuhan mandatory spending 20% APBD. Disampaikan bahwa Kabupaten Belitung telah memenuhi amanat konstitusi dan UU Sisdiknas, dimana Pemkab Belitung pada tahun 2024 telah mengalokasikan 22,72% anggaran pendidikan dalam	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>APBD nya, dengan alokasi sebesar Rp246.041.234.920,00 (Dua ratus empat puluh enam miliar empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari total APBD TA 2024 sebesar Rp1.082.979.063.299,00 (Satu triliun delapan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Di antara permasalahan yang mengemuka dan disampaikan oleh dinas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten Belitung yaitu (1) Masih tingginya angka putus sekolah, (2) Angka partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi masih rendah, serta (3) Masih kurangnya kebijakan afirmasi terhadap pembiayaan sarana pendidikan, afirmasi SDM maupun afirmasi kurikulum untuk menyesuaikan keadaan alam Belitung yang berupa daerah kepulauan.</p>	
2.	Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung	Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) Komisi X DPR RI tanggal 24—26 Juni 2024.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Ibu Eka Apriana berharap agar bantuan-bantuan dapat tersalurkan termasuk DAK Fisik dan Non Fisik untuk seluruh wilayah di Bandar Lampung. Beliau juga menyampaikan mengenai banyaknya guru honor namun terhambat NUPTK. Kebutuhan guru honor di Kota Bandar Lampung sangat banyak, bahkan terdapat satu sekolah yang PNS nya hanya 2 dan sisanya merupakan guru honor.	
3.	Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) Komisi X DPR RI tanggal 24—26 Juni 2024.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menyebutkan, selama tiga tahun dari 2021 hingga 2023, prosentase anggaran Dinas Pendidikan Kebudayaan terhadap Anggaran Pemerintah Daerah berturut-turut adalah 26,8%, 28,13% dan 20,76%. Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pontianak yang dapat menggunakan alokasi tersebut untuk pendidikan. Meski demikian,	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak bukan tanpa kendala. Sejumlah persoalan yang mengemuka di antaranya adalah mengenai pemenuhan guru yang masih perlu diperbaiki, sarana dan prasarana yang masih minim, polemik kepemilikan lahan sekolah, anak atau siswa yang berhadapan dengan hukum, serta bantuan yang masih diperlukan tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta.</p>	
4.	<p>1. PTN BH (UI dan UNHAS) 2. PTN BLU (Univ. Riau dan Univ. Nusa Cendana NTT) 3. PTN Satker (ISI DIY dan ISBI Bandung) 4. Politeknik Negeri (Poltek Negeri Semarang dan Poltek Sriwijaya) 5. Universitas Terbuka</p>	<p>RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI tanggal 27 Juni 2024 Pukul 10.00 WIB.</p>	<p>Secara umum, Komisi X DPR RI mendorong perubahan status PTN Satker dan BLU menjadi PTN BH untuk dilakukan pengkajian kembali berdasarkan kemandirian masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana. Selain itu juga perlu meninjau kembali kebijakan perhitungan rerata UKT dengan mempertimbangkan selisih BKT dan UKT yang harus dipenuhi BOPTN. Serta mendorong adanya kolaborasi antara Ditjend Dikti dan Ditjend Kebudayaan dalam mendukung Prodi terkait Kebudayaan dan mendorong terlaksananya Prodi-Prodi bertaraf Internasional.</p>	
5.	<p>1. Univesitas Trisakti 2. Institut Teknologi dan Bisnis Banten 3. Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta 4. Politeknik LP3I Bandung 5. Politeknik Tempo 6. Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pelita)</p>	<p>RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Perguruan Tinggi Swasta tanggal 1 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB.</p>	<p>Berdasarkan penyampaian masukan dan saran dari narasumber, secara umum Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru di PTN, 2. Mengevaluasi kebijakan mengenai kinerja utama perguruan tinggi, 3. Menyusun skema pendanaan untuk PTS, 4. Mendesak untuk bekerja sama dengan BUMN dalam skema pembiayaan pendidikan, 5. Mengevaluasi kebijakan hibah dan kebijakan akreditasi, 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	7. Yayasan LP3I 8. Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas).		6. Mendorong penyusunan kebijakan pengembangan unit bisnis di PTN melalui komersialisasi hasil penelitian dan inovasi, serta 7. Mendorong untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu RI dalam evaluasi kebijakan pajak pendidikan.	
6.	Tokoh Masyarakat yang pernah mendapatkan tugas sebagai Menteri Pendidikan: 1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, D.E.A. 2. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M. AP 3. Prof. Dr. Muhammad Nasir, Ak, M.Si., Ph.D.	RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI tanggal 2 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB.	Berdasarkan penyampaian masukan dan saran dari narasumber, secara umum Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk: 1. Melakukan <i>review</i> , redefinisi, dan reformulasi anggaran pendidikan, 2. Bersungguh-sungguh mempersiapkan indonesia emas-2024 termasuk instrumen pendidikan, 3. Menata pengelolaan anggaran pendidikan, serta 4. Mendorong untuk melakukan audit terhadap alokasi anggaran pendidikan melalui tkdd. Hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan pendidikan, yaitu peningkatan <i>spending quality</i> , penuntasan Wajib Belajar 12 tahun, pelejitan mutu bidang STEM, rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur, penguatan pendidikan vokasi, serta afirmasi untuk memastikan akses bagi dhuafa dan daerah 3T.	
7.	1. Ikatan Alumni ITB (IA-ITB) 2. Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI) 3. Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI) 4. Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta	RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI tanggal 3 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB.	Berdasarkan penyampaian masukan dan saran dari narasumber, secara umum Komisi X DPR RI mempertimbangkan gagasan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui <i>online learning</i> , dan adanya tabungan pendidikan yang dikelola pemerintah untuk menjamin orangtua yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu juga mendorong Kemendikbudristek RI memberi fasilitas pendidikan (beasiswa) bagi lulusan SMA/K yang berada di kuadran 3. Serta mendorong PTNBH memiliki	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan.	
8.		Rapat Internal Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI tanggal 4 Juli 2024 Pukul 12.00 WIB.	(Rapat tertutup)	
9.	Forum Guru Honorer: 1. Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) 2. Forum Guru Prioritas Pertama KCD XII Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 3. Forum Guru Honorer Lulus <i>Passing Grade</i> Seluruh Indonesia (FGHLPSI) PPPK Guru 2021 4. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) 5. Guru Honorer Negeri 10+ (GHN10+) Lampung Utara	RDPU Komisi X DPR RI tanggal 4 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB.	Berdasarkan penyampaian aspirasi dari Forum Guru Honorer, Komisi X DPR RI mendesak dan mendorong Kemendikbudristek RI untuk menuntaskan persoalan dari pengangkatan guru ASN PPPK, dan membuat kebijakan terobosan pelaksanaan dari Pasal 66 No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan memastikan tenaga guru dan tenaga kependidikan non ASN mendapatkan keadilan. Komisi X DPR RI juga mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenkeu RI, Kemendagri dan Pemda khususnya Pemda Lampung Utara untuk menyelesaikan permasalahan formasi guru ASN PPPK.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	Kota Semarang	Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) Komisi X DPR RI tanggal 5—7 Juli 2024.	Dalam pertemuan disampaikan bahwa Kota Semarang telah memenuhi amanat konstitusi dan UU Sisdiknas, dimana Pemkot Semarang pada tahun 2024 telah mengalokasikan 20,70% anggaran pendidikan dalam APBD nya. Pendanaan pendidikan selain dari APBN dan APBD Kota juga bersumber dari APBD Provinsi, BAZNAS maupun CSR. Adapun permasalahan yang ada yaitu mengenai jenis bantuan selain BOS dan PIP yang kurang transparan, dan perlunya revitalisasi LPTK.	
11.	Kota Salatiga	Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) tanggal 5—7 Juli 2024.	Dalam pertemuan disampaikan bahwa anggaran pendidikan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing 20,3% dan 19,24% dari APBD Kota Salatiga. Persoalan yang disampaikan pemangku kepentingan yaitu kurangnya BOSP, belum adanya kejelasan mengenai kesejahteraan guru agama, permasalahan rekrutmen PPPK, keterlambatan pembayaran sertifikasi guru, serta nomenklatur tutor pada PKBM menghambat akses tunjangan.	
12.	Kabupaten Batang	Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Pembiayaan Pendidikan) Komisi X DPR RI Tanggal 5—7 Juli 2024.	Dalam pertemuan disampaikan permasalahan yang mengemuka yaitu masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah SMP dengan lulusan SD, serta masalah kekurangan guru. Hal lainnya adalah terkait pentingnya perbaikan Akses, Mutu, dan Relevansi yang harus berjalan baik dan seimbang sehingga memerlukan kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan <i>stakeholder</i> pendidikan.	
13.		Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Juli 2024 Pukul 15.00 WIB.	Rapat tertutup	
14.	Eselon I Kemendikbudristek RI:	RDP Komisi X DPR RI tanggal 9 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB.	Secara umum, Komisi X DPR RI memandang Kemendikbudristek perlu memastikan dampak serangan	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekjen Kemendikbudristek RI 2. Dirjen GTK Kemendikbudristek RI 3. Dirjen PAUD, DIKDASMEN Kemendikbudristek RI 4. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI 5. Dirjen Dikti Ristek Kemendikbudristek 6. Kepala BSKAP Kemendikbudristek RI 		<p><i>ransomware</i> terhadap Pusat Data Nasional tidak mengganggu pengelolaan data pendidikan, mendorong untuk membuat sistem <i>backup</i> data pendidikan secara mandiri, dan penyusunan sistem pengintegrasian data mahasiswa lintas perguruan tinggi, serta membuat kebijakan terkait pembatasan rentang waktu penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) di PTN. Terkait permasalahan PPDB, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan PPDB sistem zonasi, dan menyusun skema kerja sama model <i>public-private partnership</i> dengan memberdayakan sekolah swasta.</p>	
15.		Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 10 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB.	Rapat tertutup	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 26 Juni 2024, dengan agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Triwulan I Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2024; dan 2. Pembahasan RKA OJK TA 2025. 	<p>Komisi XI DPR RI dan Ketua DK OJK menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua DK OJK tentang Laporan Triwulan I Tahun 2024. 2. OJK mempertajam kinerja OJK yang ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkualitas. 3. OJK menyampaikan Laporan Triwulan I sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dalam Pasal 8 Angka 17 UU PPSK, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK; b. Laporan kinerja program dan indikator kinerja OJK; c. Laporan capaian kinerja DK dan ADK; d. Laporan pelaksanaan anggaran tahunan; e. Laporan lainnya (yang dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja kelembagaan OJK). <p>Laporan Triwulan I disampaikan sebelum tanggal 9 Juli 2024. Pendalaman Laporan Triwulan I dan rencana tindak lanjut LHP BPK tentang Sewa Gedung Wisma Mulia dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024.</p> 4. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua DK OJK tentang Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2025. 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2025 akan dilaksanakan pada Panitia Kerja Penerimaan dan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilaksanakan pada Rabu – Kamis, 26 – 27 Juni 2024.	
2.	Panja RKA OJK Tahun Anggaran 2025	Rapat panja dilaksanakan tanggal 26 Juni 2024.	Pembahasan Panja RKA OJK Tahun Anggaran 2025.	Tertutup
3.	Panja Penerimaan OJK Tahun Anggaran 2025	Rapat panja dilaksanakan tanggal 26 Juni 2024.	Pembahasan Panja Penerimaan OJK Tahun Anggaran 2025.	Tertutup
4.	Panja RKA OJK Tahun Anggaran 2025	Rapat dilaksanakan tanggal 27 Juni 2024.	Pembahasan Panja RKA OJK Tahun Anggaran 2025.	Tertutup
5.	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 27 Juni 2024 dengan agenda Pengambilan Keputusan atas RKA OJK TA 2025.	<p>Komisi XI DPR RI dan Ketua DK OJK menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Komisi XI DPR RI menyetujui Proyeksi Penerimaan OJK Tahun 2024 sebesar Rp8.075.088.756.938,00 (Delapan Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), sedangkan Proyeksi Penerimaan OJK Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.528.197.965.605,00 (Delapan Triliun Lima Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Rupiah).</p> <p>Dengan demikian total proyeksi penerimaan OJK tahun 2024 dan 2025 berdasarkan jenis pungutan sebesar Rp16.603.286.722.543,00 (Enam Belas Triliun Enam Ratus Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: right;">dalam rupiah</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT				KETERANGAN	
			No	Jenis Pungutan	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024	Proyeksi Penerimaan Tahun 2025	Jumlah	
					a	b	(a + b)	
			1	Registrasi	86.706.500.000	88.205.000.000	174.911.500.000	
			2	Pungutan Tahunan	7.527.350.141.648	8.176.948.744.972	15.704.298.886.620	
			3	Penerimaan Lain-Lain	461.032.115.290	263.044.220.633	724.076.335.923	
			Total		8.075.088.756.938	8.528.197.965.605	16.603.286.722.543	
			<p>Dengan Penerimaan OJK berdasarkan bidang tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: right;">dalam rupiah</p>					
			No	Pungutan Bidang	Proyeksi Penerimaan Tahun 2024	Proyeksi Penerimaan Tahun 2025	Jumlah	
					a	b	(a + b)	
			1	Perbankan	5.706.135.175.782	6.285.304.739.011	11.991.439.914.793	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT				KETERANGAN	
			2	Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon	872.684.517.526	990.038.758.039	1.862.723.275.565	
			3	Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	691.206.254.670	623.367.041.388	1.314.573.296.058	
			4	Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya	344.030.693.670	366.443.206.534	710.473.900.204	
			5	Penerimaan Lainnya	461.032.115.290	263.044.220.633	724.076.335.923	
			Total		8.075.088.756.938	8.528.197.965.605	16.603.286.722.543	
			2. OJK meningkatkan kualitas proses bisnis pengelolaan pungutan dengan tetap memerhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK.					

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. OJK akan melaporkan realisasi dari penerimaan pungutan tahun 2024 dan tahun 2025 dengan memerhatikan pergerakan indikator ekonomi makro dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI dan OJK.</p> <p>4. OJK memastikan strategi pengelolaan penerimaan pungutan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan risiko yang terukur serta dengan memerhatikan perkembangan di pasar keuangan global dan domestik.</p> <p>5. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan RKA OJK tahun 2025 melakukan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang memperkuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Roadmap</i> OJK akan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. • Memperkuat efektivitas fungsi regulasi dan pengawasan yang ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan LSJK. • Meningkatkan kontribusi SJK bagi perekonomian nasional yang ditunjukkan porsi SJK dalam PDB yang meningkat. <p>A. Perbankan</p> <p>Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat sektor perbankan yang lebih kontributif; <i>sustainable finance</i>; responsif atas tindak pidana perbankan; meningkatkan literasi dan inklusi perbankan Syariah; digitalisasi perbankan, dan mitigasi risiko; capaian <i>roadmap</i> pengembangan perbankan Indonesia Tahun 2025 yang berkualitas, perbankan Syariah dan BPRS Tahun 2025 yang berkualitas; implementasi peningkatan permodalan Bank</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>disesuaikan dengan karakteristik perbankan.</p> <p>B. Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat persiapan penanganan keuangan derivatif; kapitalisasi pasar; responsif atas tindak pidana pada sektor pasar modal; literasi keuangan di Pasar Modal; ekosistem keuangan berkelanjutan dan transparan di Pasar Modal; capaian <i>roadmap</i> bidang pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Tahun 2025 yang berkualitas.</p> <p>C. Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat upaya penyelesaian LJK PPDP bermasalah; peningkatan literasi dan inklusi LJK PPDP; <i>database</i> pemegang polis; responsif atas tindakan <i>fraud</i> dan tindak pidana bidang PPDP; perlindungan konsumen;</p> <p>D. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PPMVLKM) Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat penyelesaian LJK PPMVLKM bermasalah dan penegakan hukum; pencegahan pinjaman <i>online</i> ilegal; pembangunan ekosistem LJK yang sehat; peningkatan literasi; capaian <i>roadmap</i> Lembaga pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya Tahun 2025 yang berkualitas; persiapan penanganan Koperasi Sektor Keuangan.</p> <p>E. Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat ekosistem IAKD yang sehat, berkelanjutan, dan kontributif; peningkatan literasi; pengawasan dan perizinan penyelenggaraan ITSK; Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto; responsif atas perkembangan ITSK dan IAKD; penajaman kualitas capaian <i>roadmap</i> industri ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Tahun 2025.</p> <p>F. Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen</p> <p>Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta pencegahan aktivitas keuangan ilegal; koordinasi pengawasan <i>market conduct</i>; penyelesaian pengaduan; responsif atas tindak pidana yang diadakan; pendampingan hukum bagi nasabah.</p> <p>G. Audit Internal dan Manajemen Risiko</p> <p>Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat tata kelola yang efektif dan efisien; ekosistem OJK yang transparan dan akuntabel; manajemen risiko melalui <i>early warning system</i>; pengendalian kualitas pengawasan OJK; responsif atas <i>fraud</i> dan tindak pidana.</p> <p>H. Kebijakan Strategis</p> <p>Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi; pengawasan konglomerasi keuangan; responsif atas tindakan APU PPT;</p> <p>I. Manajemen Strategis</p> <p>Kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat Implementasi SDM dan Organisasi formasi</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																
			<p>efektif OJK; komunikasi kelembagaan; transformasi digital; budaya kerja OJK yang professional; pengembangan sistem dan teknologi informasi OJK yang memperhatikan keamanan data, <i>user friendly</i>, sistem yang terintegrasi, berdaya guna; penajaman <i>roadmap</i> pemenuhan SDM untuk formasi efektif OJK; pengisian jabatan dilingkungan OJK dilaksanakan dengan memperhatikan <i>merits system</i> dan kompetensi; kompetensi SDM dan efektivitas untuk memenuhi formasi efektif OJK.</p> <p>6. Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif RKA OJK Tahun 2025 sebesar Rp11.557.368.948.861,00 (Sebelas Triliun Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1093 802 1832 1361"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1093 802 1149 1026">A</td> <td data-bbox="1149 802 1547 1026">Alokasi untuk Program dan Kegiatan (<i>baseline</i>, termasuk remunerasi insentif atas kinerja tahun 2024, PPh 21, PPh 21 Insentif atas tahun 2024)</td> <td data-bbox="1547 802 1832 1026">8.000.000.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1026 1149 1321" rowspan="3">B</td> <td data-bbox="1149 1026 1547 1102">Pembayaran Pajak dan Remunerasi Insentif</td> <td data-bbox="1547 1026 1832 1102">2.557.368.948.861</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 1102 1547 1187">1) Remunerasi atas kinerja tahun 2025</td> <td data-bbox="1547 1102 1832 1187">990.928.834.623</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1149 1187 1547 1272">2) PPh 21 insentif atas kinerja tahun 2025</td> <td data-bbox="1547 1187 1832 1272">346.825.092.118</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1272 1149 1321"></td> <td data-bbox="1149 1272 1547 1321">3) PPh Badan</td> <td data-bbox="1547 1272 1832 1321">1.219.615.022.120</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 1321 1149 1361">C</td> <td data-bbox="1149 1321 1547 1361">Inisiatif baru</td> <td data-bbox="1547 1321 1832 1361">1.000.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	A	Alokasi untuk Program dan Kegiatan (<i>baseline</i>, termasuk remunerasi insentif atas kinerja tahun 2024, PPh 21, PPh 21 Insentif atas tahun 2024)	8.000.000.000.000	B	Pembayaran Pajak dan Remunerasi Insentif	2.557.368.948.861	1) Remunerasi atas kinerja tahun 2025	990.928.834.623	2) PPh 21 insentif atas kinerja tahun 2025	346.825.092.118		3) PPh Badan	1.219.615.022.120	C	Inisiatif baru	1.000.000.000.000	
A	Alokasi untuk Program dan Kegiatan (<i>baseline</i>, termasuk remunerasi insentif atas kinerja tahun 2024, PPh 21, PPh 21 Insentif atas tahun 2024)	8.000.000.000.000																		
B	Pembayaran Pajak dan Remunerasi Insentif	2.557.368.948.861																		
	1) Remunerasi atas kinerja tahun 2025	990.928.834.623																		
	2) PPh 21 insentif atas kinerja tahun 2025	346.825.092.118																		
	3) PPh Badan	1.219.615.022.120																		
C	Inisiatif baru	1.000.000.000.000																		

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN		
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Total</td> <td style="text-align: right;">11.557.368.948.861</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terkait dengan pembayaran pajak pada bagian B diperlukan konfirmasi dan klarifikasi antara OJK dan Kementerian Keuangan. ▪ Apabila realisasi pembayaran pajak pada bagian B, terdapat kelebihan bayar dari pagu, maka kelebihan bayar tersebut akan digunakan untuk TA 2026. ▪ OJK akan menyesuaikan alokasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2025 sesuai pagu tersebut. <p>7. Pagu definitif RKA OJK Tahun 2025 akan ditetapkan setelah penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2025.</p>	Total	11.557.368.948.861	
Total	11.557.368.948.861					
6.	Menteri Keuangan	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 1 Juli 2024 dengan agenda Pengantar Pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN Tahun Anggaran 2024.	Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Keuangan mengenai rencana penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN TA 2024. 2. Pembahasan lebih lanjut mengenai rencana penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN TA 2024 akan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai jadwal yang telah ditentukan.			
7.	1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 1 Juli 2024, dengan agenda:	Komisi XI DPR RI dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia			

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	2. Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero); 3. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 4. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero); dan 5. Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero)	1. PMN APBN TA 2024 tunai diberikan kepada PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 2. PMN APBN TA 2024 tunai dari cadangan pembiayaan investasi di berikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Industri Kereta Api (Persero)	<p>(Persero), dan Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero), menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) tentang alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2024. 2. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp1.891.000.000.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2024 kepada PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang akan digunakan untuk memenuhi dukungan program FLPP dengan target penyaluran 166.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). <ol style="list-style-type: none"> a. PMN akan diarahkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjaga proporsi/beban Pemerintah dalam KPR FLPP, serta menambah jumlah rumah yang dibiayai melalui <i>leveraging</i> yang dilakukan oleh Perseroan. 2) Menyediaan pembiayaan perumahan bagi MBR. 3) Meningkatkan pembiayaan perumahan yang secara bertahap akan mendorong bergeraknya sektor riil, yang berarti membuka lapangan kerja dan memberikan <i>multiplier effect</i> terhadap pertumbuhan ekonomi. 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4) Tersedianya fasilitas pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau. 5) Melalui <i>leverage</i> yang dilakukan oleh Perseroan, masyarakat yang dapat terfasilitasi menjadi lebih banyak. 6) Meningkatkan kapasitas PT. SMF (Persero) sebagai SMV dalam mendukung Program Pemerintah di sektor Perumahan. 7) Meningkatkan kontribusi Perseroan terhadap sektor riil perumahan dengan mengalirkan dana dari pasar modal. 8) Memperkuat struktur permodalan yang meningkatkan kemampuan <i>leveraging</i> SMF dalam menjalankan mandat untuk pembiayaan perumahan bagi MBR. <p>b. PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2) Pengelolaan <i>leverage</i> PMN yang optimal tinggi, berkelanjutan, dan bermitigasi risiko. 3) Memberikan <i>multiplier effect</i> terhadap sektor riil. 4) Memperkuat pembiayaan sekunder perumahan. 5) Memperkuat sinergi dan koordinasi antar Kementerian Keuangan, BP Tapera, Perumnas, BTN, SMF, dan Kementerian PUPR. 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (Sepuluh Triliun Rupiah) pada Tahun Anggaran 2024 kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang akan digunakan untuk melaksanakan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang diberikan oleh Pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kapasitas 8 (delapan) PKE yang telah berjalan dan penambahan 4 (empat) PKE baru.</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kapasitas Penugasan Khusus Ekspor (PKE) terhadap program eksisting maupun baru. 2) Penguatan daya saing produk dan jasa Indonesia 3) Peningkatan kapasitas usaha LPEI. 4) Membantu LPEI dalam meningkatkan layanan kepada UKME dan UMBE melalui program PKE. 5) Memberikan <i>market confidence</i> dengan dukungan Pemerintah terhadap ekspor Indonesia. 6) Membantu LPEI meningkatkan <i>earnings</i> sehingga dapat lebih banyak melayani eksportir baik secara komersial maupun PKE. 7) Peningkatan devisa negara estimasi Rp166,45 Triliun pada 2024-2028. 8) Mendorong penciptaan eksportir baru dan kesempatan lapangan pekerjaan. <p>b. LPEI meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas pembiayaan LPEI yang ditunjukkan dengan 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p> <ul style="list-style-type: none"> 1) penguatan <i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC). 2) Pelaksanaan Program Khusus Ekspor (PKE) yang ditunjukkan dengan kontribusi dalam meningkatkan nilai devisa. 3) Meningkatkan jumlah dan kapasitas eksportir produk-produk strategis nasional. 4) Memperkuat daya saing produk. 5) Penyelesaian aset bermasalah diarahkan untuk memulihkan potensi dan/atau kerugian negara, serta kualitas aset yang berkualitas. 6) Memperkuat bisnis model untuk memperbaiki kinerja keuangan. <p>c. Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI.</p> <p>4. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (Dua Triliun Rupiah) pada Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PMN akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (CAPEX) <i>retrofit</i> dan pengadaan baru <i>train set</i> KRL. b. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) meningkatkan kinerja dalam: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pelayanan yang nyaman bagi pelanggan. </p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> 2) Modernisasi sarana perkeretaapian KRL. 3) Memperbaiki struktur modal dan kapasitas usaha untuk mendukung operasional dalam menjalankan PSO. c. Pemerintah menyampaikan <i>roadmap</i> perkeretaapian Indonesia, yang berisikan antara lain: strategi produksi kereta api; industri kereta api; pemenuhan kebutuhan transportasi penduduk, dan lain-lain. 5. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp965.000.000.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi kepada PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero). <ul style="list-style-type: none"> a. PMN akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (CAPEX) fasilitas produksi kereta berpengerak <i>stainless steel</i> di pabrik Banyuwangi. b. PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero) meningkatkan kinerja dalam: <ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan daya saing perusahaan untuk melayani permintaan pasar. 2) Meningkatkan TKDN dalam memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri. 6. Persetujuan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 2024. 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT. Industri Kereta Api (Persero) akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI sebelum Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 2024.</p>	
8.	<p>1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 2. Direktur Utama PT. Len Industri (Persero); 3. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); 4. Direktur Utama Perum DAMRI; 5. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI; 6. Pelaksana Harian Direktur Utama PT. Pertamina (Persero); 7. Direktur Utama PT. Bio Farma (Persero);</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 2 Juli 2024, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMN Non-tunai yang berasal dari konversi piutang di berikan kepada PT. Len Industri (Persero); 2. PMN yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) di berikan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Perum DAMRI, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko LPPNPI, PT. Pertamina (Persero), PT. Bio Farma (Persero), PT. Varuna Tirta Prakarsya (Persero), 	<p>Komisi XI DPR RI dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT. Len Industri (Persero), Direktur Utama PT. Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT. Sejahtera Eka Graha, Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama Perum Damri, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI/Airnav, Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Direktur Utama Perum Perumnas, Direktur Utama PT. Danareksa (Persero) menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Utama PT. Len Industri (Persero), Direktur Utama PT. Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT. Sejahtera Eka Graha, Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), Direktur Utama PT. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama Perum Damri, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI/Airnav, Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>8. Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakarsya (Persero); 9. Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero); 10. Direktur Utama Perum Perumnas; 11. Direktur Utama PT. Sejahtera Eka Graha; dan 12. Direktur Utama PT. Danareksa (Persero).</p>	<p>PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Perumnas, PT. Sejahtera Eka Graha, dan PT. Danareksa (Persero).</p>	<p>Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Direktur Utama Perum Perumnas, Direktur Utama PT. Danareksa (Persero), tentang alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Tahun Anggaran 2024.</p> <p>2. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang eks BPPN pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp649.229.893.900,48 (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah Empat Puluh Delapan Sen).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperbaiki struktur permodalan perusahaan yang akan memberikan peningkatan kemampuan modal bersih, sehingga perusahaan dapat memperbaiki tingkat <i>leverage</i>. 2) Memperbaiki <i>Debt Equity Ratio</i> (DER) perusahaan, sehingga menambah kemampuan perusahaan untuk mendapat modal kerja baru. 3) Dengan adanya tambahan pinjaman modal kerja, perusahaan mampu untuk menyelesaikan proyek-proyek baru dan mencapai penjualan yang lebih tinggi. <p>b. PT. Len Industri (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profitabilitas. 2) Memperbaiki rasio <i>leverage</i>. 3) Kinerja keuangan yang membaik. 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada PT. Bio Farma (Persero) pada Tahun Anggaran 2024 berupa Peralatan dan bangunan untuk fasilitas produksi vaksin eks flu burung yang bersumber dari BMN milik Kementerian Kesehatan dengan nilai wajar Rp68.001.537.000,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan BMN digunakan untuk usaha yang lebih produktif. 2) Percepatan kemandirian Industri Farmasi Nasional dengan mengurangi ketergantungan impor. 3) Percepatan produksi vaksin baru sebagai upaya kemandirian nasional untuk pencegahan penyakit seperti Rotavirus dan Rubella serta terapi Kesehatan seperti Biosimilar. <p>b. PT. Bio Farma (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan BMN menjadi aset yang lebih produktif. 2) Percepatan kemandirian Industri Farmasi Nasional. 3) Mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor dan menghemat devisa negara. 4) Penerimaan dividen yang meningkat. 5) Percepatan pengembangan produk bioteknologi. <p>4. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada PT. Sejahtera Eka Graha pada Tahun Anggaran 2024 berupa 71 bidang tanah di Bogor</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>seluas 290.440 m2 yang bersumber dari eks aset BPPN dengan nilai wajar sebesar Rp1.227.507.101.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN pada Kementerian Keuangan melalui pengembangan <i>on site</i> oleh PT. Sejahtera Eka Graha. 2) Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan. <p>b. PT. Sejahtera Eka Graha meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Bogor Timur. 2) Memberi tambahan <i>revenue</i>. 3) Potensi penambahan lapangan pekerjaan pada saat konstruksi pembangunan maupun setelah kawasan selesai dibangun. <p>5. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) pada Tahun Anggaran 2024 berupa satu bidang tanah dan bangunan kantor yang bersumber dari BMN milik Kementerian BUMN dengan nilai wajar sebesar Rp24.127.146.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan BMN sebagai lokasi kantor pusat PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero). 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2) Meningkatkan kinerja perusahaan dan penghematan biaya operasional.</p> <p>b. PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <p>1) Menumbuhkan kembali entitas bisnis dan <i>brand image</i> sebagai perusahaan jasa logistik.</p> <p>2) Memperbaiki kinerja keuangan.</p> <p>6. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada Tahun Anggaran 2024 berupa 10 Kapal Motor Penumpang yang bersumber dari Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan dengan nilai wajar sebesar Rp367.531.225.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <p>1) Meningkatkan kontribusi kepada Negara berupa Dividen.</p> <p>2) Mengurangi beban pengeluaran keuangan Negara/ Pemerintah yang bersumber dari APBN untuk biaya pemeliharaan kapal.</p> <p>b. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <p>1) Kinerja operasional dan kinerja keuangan Perusahaan.</p> <p>2) Sebagai <i>Agent Development</i> dalam meningkatkan</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pertumbuhan perekonomian di lintasan keperintisan.</p> <p>3) Memberikan pelayanan perpindahan penumpang dan logistik dari satu pulau ke pulau lainnya.</p> <p>7. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada Perum DAMRI pada Tahun Anggaran 2024 berupa 580 unit bus yang bersumber dari Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Perhubungan dengan nilai wajar sebesar Rp460.721.700.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan kejelasan status aset BMN bagi Perum DAMRI. 2) Mengembangkan sarana angkutan umum. <p>b. Perum DAMRI meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat pengguna jasa transportasi. 2) Produktivitas dan kapasitas bisnis perusahaan, sehingga memiliki keberlanjutan usaha. <p>8. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada Perum LPPNPI/Airnav pada Tahun Anggaran 2024 berupa 191 unit bangunan dan peralatan navigasi bandara yang bersumber dari Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Perhubungan dengan nilai wajar sebesar Rp301.892.091.817,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi tata kelola aset perusahaan. 2) Optimalisasi pelayanan navigasi penerbangan. <p>b. Perum LPPNPI/Airnav meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas keselamatan dan standarisasi penerbangan di Indonesia; 2) Mendukung transportasi udara di daerah-daerah dengan jaminan keamanan dan keselamatan; 3) Optimalisasi pelayanan navigasi penerbangan di daerah-daerah. <p>9. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada PT. Pertamina (Persero) pada Tahun Anggaran 2024 berupa 82 ruas sarpras jaringan gas, satu Stasiun Pengisian Berbahan Bakar Gas (SPBG) dan infrastruktur pipa SPBG Barang Milik Negara (BMN) Kementerian ESDM dan 2 (dua) unit sarpras instalasi <i>fuel hydrant</i> bandara yang bersumber dari dan Kementerian Perhubungan dengan nilai wajar sebesar Rp4.182.922.836.180,00. (Empat Triliun Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan gas bumi untuk keperluan Rumah Tangga dan Transportasi. 2) Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan Jargas 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan SPBG sebagai infrastruktur energi transisi mencapai aspirasi <i>Net Zero Emission</i> di tahun 2060.</p> <p>3) Peningkatan ketahanan energi berupa jaminan ketersediaan Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP) bagi Masyarakat.</p> <p>b. PT. Pertamina (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <p>1) Memberikan <i>service level</i> dalam pengisian BBMP ke pesawat udara untuk maskapai penerbangan.</p> <p>2) Keandalan operasional pelayanan pengisian BBMP ke pesawat udara.</p> <p>3) <i>Bargaining position</i> Pertamina dalam <i>value chain</i> BBMP.</p> <p>4) Menaikan citra Pertamina dalam industri aviasi dalam pelayanan BBMP.</p> <p>10. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) pada Tahun Anggaran 2024 berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Kwala Sawit dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Pagar Merbau yang berasal dari BMN Kementerian ESDM, serta Mesin, Peralatan dan <i>Aset Off Farm</i> yang bersumber dari Kementerian Perindustrian dengan nilai wajar sebesar Rp828.361.655.982,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan gas limbah cair Pabrik Kelapa Sawit untuk menghasilkan energi listrik sebagai sumber energi baru terbarukan, berkelanjutan dan ramah lingkungan. 2) Memberikan tambahan pendapatan perusahaan dari penjualan energi listrik sebesar 1 MW kepada PLN sebagai pembeli listrik tunggal di pasar ketenagalistrikan di Indonesia, dan bertanggung jawab untuk membeli listrik yang dihasilkan oleh IPP (<i>Independent Power Producer</i>) melalui PPA (<i>Power Purchase Agreement</i>). 3) Peningkatan kapasitas dan dibentuknya unit bisnis baru akan membuka lapangan pekerjaan dengan kompetensi tinggi (<i>High-Skilled Jobs</i>) untuk KEK Sei Mangke. 4) Meningkatkan nilai perusahaan dan potensi pendapatan perusahaan. 5) Menambah lapangan pekerjaan bagi Masyarakat untuk industri BioEthanol. <p>b. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkuat posisi dan meningkatkan daya saing Perusahaan khususnya pengembangan <i>non core business</i>. 2) Meningkatkan kapasitas usaha PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> 3) Memberikan tambahan pendapatan Perusahaan melalui pengelolaan Kawasan industri untuk KEK Sei Mangke. 4) Meningkatkan produk-produk industri kelapa sawit hilir yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi dan berpotensi ekspor sehingga meningkatkan penerimaan untuk negara untuk KEK Sei Mangke. 5) Menambah daya saing terhadap Perusahaan sejenis yang ada di Indonesia untuk Industri Gula. <p>11. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada Perum Perumnas pada Tahun Anggaran 2024 berupa 7 (tujuh) bidang tanah dan 3 (tiga) unit bangunan rusunawa di Jakarta, Bogor, Surabaya, Batam, dan Medan yang bersumber dari BMN Kementerian PUPR dengan nilai wajar sebesar Rp1.109.679.804.000,00 (Satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PMN akan diarahkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 2) Penambahan <i>land bank</i> (stok tanah). b. Perum Perumnas meningkatkan kinerja dalam <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyerapan tenaga kerja dan stimulus peningkatan ekonomi kawasan. 2) Penyediaan hunian layak huni dan Peningkatan kualitas hidup 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3) Berkontribusi dalam penurunan <i>backlog</i> perumahan nasional.</p> <p>4) Optimalisasi Barang Milik Negara (BMN).</p> <p>5) Peningkatan perekonomian kawasan sebagai <i>multiplier effect</i> dari pengembangan perumahan dan permukiman.</p> <p>6) Kontribusi terhadap penerimaan bagi negara.</p> <p>12. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Non Tunai kepada PT. Danareksa (Persero) pada Tahun Anggaran 2024 berupa sarana dan prasarana di Kawasan Industri Terpadu Batang (Instalasi pengolahan air limbah/air bersih, Rusun, Jalan Kawasan, dan <i>reservoir</i> air baku) yang bersumber dari BMN Kementerian PUPR dengan nilai wajar sebesar Rp3.347.181.451.745,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan daya saing Kawasan Industri yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional . 2) Peningkatan percepatan pertumbuhan industri Nasional. 3) Penciptaan lapangan kerja baru. 4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). <p>b. PT. Danareksa (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> 1) Percepatan pembangunan Kawasan Industri baru. 2) Produktivitas dan pelayanan kepada <i>tenant</i>. 3) <i>Leverage</i> dan nilai komersial perusahaan. 4) Membantu mengatasi keterbatasan <i>resources</i> dalam pengembangan PT. Kawasan Industri Terpadu Batang. <p>13. PT. Len Industri (Persero), PT. Bio Farma (Persero), PT. Sejahtera Eka Graha, PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Perum Damri, Perum LPPNPI/Airnav, PT. Pertamina (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Perumnas, PT. Danareksa (Persero) menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan Penyertaan Modal Negara per semester.</p> <p>14. Kementerian Keuangan menjamin dan bertanggung jawab bahwa nilai BMN yang diserahkan kepada PT. Bio Farma (Persero), PT. Sejahtera Eka Graha, PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Perum Damri, Perum LPPNPI/Airnav, PT. Pertamina (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Perumnas, PT. Danareksa (Persero) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) akan disesuaikan kembali berdasarkan penilaian dengan prinsip-prinsip <i>appraisal</i> yang sah dan akuntabel.</p> <p>15. Persetujuan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 2024.</p> <p>16. PT. Bio Farma (Persero), PT. Sejahtera Eka Graha, PT. Varuna</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Tirta Prakasya (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Perum Damri, Perum LPPNPI/Airnav, PT. Pertamina (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Perumnas, PT. Danareksa (Persero) menyampaikan rencana Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) yang berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BMN yang diserahkan sebagai PMPP. b. Beban pengelolaan aset. c. Manfaat ekonomi. d. Dampak bagi perusahaan. <p>Disampaikan kepada Komisi XI DPR RI sebelum Rapat Kerja Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 2024.</p> <p>17. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Utama PT. Len Industri (Persero), Direktur Utama PT. Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT. Sejahtera Eka Graha, Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero), Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama Perum Damri, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LPPNPI/Airnav, Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), Direktur Utama Perum Perumnas, Direktur Utama PT. Danareksa (Persero) akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI sebelum Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 2024.</p>	
9.	1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;	Rapat Dengar Pendapat tanggal 2 Juli 2024, dengan agenda:	Komisi XI DPR RI dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero), dan	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; 3. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero); dan 4. Direktur Utama PT. Pelayaran Nusantara Indonesia (Persero).</p>	<p>1. PMN APBN TA 2024 tunai dari cadangan pembiayaan investasi di berikan kepada PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Pelayaran Nusantara Indonesia (Persero); 2. PMN yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) di berikan kepada PT. Hutama Karya (Persero)</p>	<p>Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero), dan Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tentang alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai Tahun Anggaran 2024.</p> <p>2. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) pada Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi kepada PT. Hutama Karya (Persero).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT. Hutama Karya (Persero) dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. 2) Melanjutkan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang – Betung yang juga masuk kedalam PSN. 3) Meningkatkan <i>konektivitas backbone</i> Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Pelabuhan Bakauheni hingga Jambi diperlukan kelanjutan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang – Betung. <p>b. PT. Hutama Karya (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengoptimalkan realisasi pemanfaatan PMN untuk 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>mempercepat penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).</p> <p>2) Meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya JTTS.</p> <p>3) Mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan perekonomian di sepanjang koridor JTTS.</p> <p>3. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Barang Milik Negara kepada PT. Utama Karya (Persero) berupa aset lahan di Karawaci - Tangerang dan di Plaju – Palembang, yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, dengan nilai wajar sebesar Rp1.938.044.104.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Rupiah).</p> <p>a. PMN akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan guna mendukung urgensi pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan proyek yang ada. 2) Menciptakan <i>multiplier effect</i> yang mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat. <p>b. PT. Utama Karya (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memanfaatkan aset <i>idle</i> Pemerintah menjadi produktif. 2) Untuk dapat menghasilkan pengembangan yang optimal, dengan rekomendasi <i>highest and best use</i>. 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> 3) Efisiensi biaya pemeliharaan aset. 4) Menciptakan lapangan pekerjaan baru pada daerah setempat. c. Kementerian Keuangan menjamin bahwa nilai aset Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) telah dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip <i>appraisal</i> yang sah dan akuntabel. 4. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). <ul style="list-style-type: none"> a. PMN akan diarahkan untuk pembelian 1 (satu) unit kapal baru (<i>new building</i>) dari alokasi Cadangan Investasi 2024 dalam rangka melaksanakan penugasan Pemerintah dalam pengoperasian Kapal Penumpang. b. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) meningkatkan kinerja dalam: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sarana transportasi laut yang dapat menjamin keselamatan masyarakat. 2) Sebagai <i>freight balancing</i> untuk angkutan logistik di Indonesia. 3) Keberlangsungan perusahaan sebagai <i>national flag carrier</i>. 4) Menjaga image perusahaan pada aspek keselamatan dan aspek keamanan pelayaran. 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>5) Pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik dan nyaman.</p> <p>6) Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan untuk mendukung operasional perusahaan.</p> <p>c. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menyampaikan <i>roadmap</i> sebagai <i>national freight carrier</i> yang berisikan antara lain: rencana pemenuhan sarana transportasi, kinerja keuangan perusahaan, investasi yang diperlukan, dan lain-lainnya.</p> <p>d. Komisi XI DPR RI merekomendasikan Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah), untuk uang muka pengadaan 3 (tiga) unit kapal baru penumpang PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang telah melewati batas usia operasi.</p> <p>5. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Tambahan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah (Dana Cadangan Penjaminan) sebesar Rp635.000.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi.</p> <p>a. Dana Cadangan Penjaminan akan diarahkan untuk tambahan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, syarat, dan ketentuan nilai akumulasi penjaminan pemerintah.</p> <p>b. DJPPR meningkatkan kinerja dalam mitigasi keberlanjutan proyek-proyek penjaminan sehingga tidak terdapat klaim atas penjaminan pemerintah.</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>6. PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan Penyertaan Modal Negara per semester.</p> <p>7. Persetujuan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 2024.</p> <p>8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktur Utama PT. Utama Karya (Persero), dan Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI sebelum Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 2024.</p>	
10.	Menteri Keuangan	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 3 Juli 2024 dengan agenda Pengambilan Keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) APBN Tahun Anggaran 2024.	<p>Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah melakukan pendalaman atas Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai Tahun Anggaran 2024. 2. Komisi XI DPR RI menyetujui PMN Tunai dan Non Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> A. PMN Tunai TA 2024 <ol style="list-style-type: none"> 1) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1.891.000.000.000,00 (<i>Satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar rupiah</i>). 2) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (<i>Lima triliun rupiah</i>); PMN 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian; <i>good corporate governance</i>; dan tidak mengulang kesalahan pengelolaan.</p> <p>Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI.</p> <p>3) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (<i>Dua triliun rupiah</i>).</p> <p>4) PT. Industri Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp965.000.000.000,00 (<i>Sembilan ratus enam puluh lima miliar</i>).</p> <p>5) PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (<i>Satu triliun rupiah</i>).</p> <p>6) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000,00. untuk uang muka pengadaan 3 (tiga) unit kapal baru penumpang PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang telah melewati batas usia operasi dengan memperhatikan kapasitas dan tata kelola perusahaan.</p> <p>Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).</p> <p>7) Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebesar Rp635.000.000.000,00 (<i>Enam ratus tiga puluh lima miliar rupiah</i>).</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program, dan kinerja pada masing-masing Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terlampir.</p> <p>8) Pemerintah tidak melaksanakan PMN Tunai yang berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Bank Tanah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (<i>Satu triliun rupiah</i>).</p> <p>B. PMN Non Tunai TA 2024</p> <p>1) PT. Utama Karya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1.938.044.104.000,00 (<i>Satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh empat juta seratus empat ribu rupiah</i>).</p> <p>2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649.229.893.948,00 (<i>Enam ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah</i>).</p> <p>3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp68.001.537.000,00 (<i>Enam puluh delapan miliar satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>).</p> <p>4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1.227.507.101.000,00 (<i>Satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh juta seratus satu ribu rupiah</i>).</p> <p>5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24.127.146.000,00 (<i>Dua</i></p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>puluh empat miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).</i></p> <p>6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367.531.225.000,00 (<i>Tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).</i></p> <p>7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460.721.700.000,00 (<i>Empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).</i></p> <p>8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301.892.091.817,00 (<i>Tiga ratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);</i></p> <p>9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4.182.922.836.180,00 (<i>Empat triliun seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).</i></p> <p>10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828.361.655.982,00 (<i>Delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).</i></p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1.109.679.804.000,00 (<i>Satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah</i>) .</p> <p>12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3.347.181.451.745,00 (<i>Tiga triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah</i>).</p> <p>Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program, dan kinerja pada masing-masing Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terlampir.</p> <p>3. Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara Tunai, Penyertaan Modal Negara Non Tunai yang berasal dari Konversi Utang, Penyertaan Modal Negara Tunai dari Cadangan Pembiayaan Investasi, dan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Barang Milik Negara menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan Penyertaan Modal Negara per semester.</p> <p>4. Kementerian Keuangan menjamin dan bertanggungjawab bahwa nilai BMN yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) akan disesuaikan kembali berdasarkan penilaian dengan prinsip-prinsip appraisal yang sah dan akuntabel.</p> <p>5. Pemerintah akan menyertakan <i>roadmap</i> perkeretaapian Indonesia, yang berisikan antara lain: strategi produksi kereta api; industri kereta api; pemenuhan kebutuhan transportasi</p>	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			penduduk, dan lain-lain, dalam setiap pengajuan PMN untuk sektor perkeretaapian. 6. PMN Non Tunai yang berasal dari Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga akan dilakukan penyelarasan dimulai dari perencanaan anggaran hingga penyerahan kepada BUMN terkait untuk diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	
11.	Kota Yogyakarta, Provinsi D. I. Yogyakarta	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada 5 - 7 Juli 2024.	Peran OJK dan Himbara dalam meningkatkan UMKM, Pengembangan Ekonomi, dan Pembiayaan Sektor Ekonomi Prioritas.	
12.	Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada 5 - 7 Juli 2024.	Sinergi Kementerian Keuangan untuk mendongkrak perekonomian di Yogyakarta.	
13.	Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada 5 - 7 Juli 2024.	Terobosan Inovatif BI dalam Lanskap Ekonomi dan Keuangan Digital di Provinsi D. I. Yogyakarta.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Gubernur Bank Indonesia	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 24 Juni 2024 dengan agenda Laporan Triwulan I Bank Indonesia Tahun Anggaran 2024.	Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia tentang Laporan Triwulan I Tahun 2024. 2. Bank Indonesia memperkuat respon bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tren menguat dan memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025.	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Bank Indonesia memperkuat peran TPIP/TPID dan bauran kebijakan untuk ikut mengatasi masalah struktural inflasi, khususnya terkait dengan inflasi komponen <i>volatile food</i>. 4. Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan memperkuat likuiditas sektor - sektor strategis tertentu. 5. Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan moneter yang ditujukan untuk menarik aliran investasi portfolio asing masuk ke Indonesia dan sekaligus langkah nyata untuk mempercepat pendalaman pasar uang sebagai implementasi dari UU P2SK. 6. Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor. 7. Bank Indonesia mempertajam kinerja Bank Indonesia yang ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkualitas. 8. Gubernur Bank Indonesia akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 	
2.	<p>Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan</p>	<p>Laporan Triwulan I Lembaga Penjamin Simpanan Tahun Anggaran 2024. Rapat kerja dilaksanakan tanggal 25 Juni 2024.</p>	<p>Komisi XI DPR RI dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Triwulan I Tahun 2024. 2. LPS dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan kinerja sektor riil; b. Memperkuat momentum intermediasi perbankan; c. Memberikan ruang lanjutan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga; dan 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Menjaga jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya, mencakup minimal 90% dari seluruh nasabah penyimpan.</p> <p>3. LPS dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Bank, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Mengedepankan upaya menjaga kepercayaan nasabah dan memperbaiki tata kelola hubungan kelembagaan antar otoritas;</p> <p>b. Melakukan inovasi dalam rangka perbaikan proses bisnis resolusi dengan memperkuat tata kelola berdasarkan prinsip <i>good corporate governance</i> dan taat pada ketentuan peraturan.</p> <p>4. LPS, dalam mendukung kinerja ekonomi, memelihara stabilitas sektor keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, akan melakukan monitoring cakupan penjaminan dan evaluasi berkelanjutan atas Tingkat Bunga Penjaminan.</p> <p>5. LPS menyempurnakan dan melengkapi Laporan Kelembagaan LPS sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dalam Pasal 7 Angka 58 UU P2SK, yang meliputi: pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang LPS, kinerja program dan indikator kinerja utama LPS, capaian kinerja Dewan Komisioner dan Anggota Dewan Komisioner, dan pelaksanaan anggaran tahunan.</p> <p>6. LPS melaksanakan monitoring terhadap kepatuhan Bank Digital untuk menyampaikan informasi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).</p> <p>7. LPS agar melakukan percepatan penyusunan RPP dan RPLPS dengan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, otoritas terkait, dan Industri Jasa Keuangan dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis dan peraturan lainnya.</p> <p>8. Ketua DK LPS akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
3.	Rapat Internal Komisi XI	Rapat dilaksanakan tanggal 25 Juni 2024.	<p>1. Pembahasan Jadwal Komisi XI dan pengesahan jadwal;</p> <p>2. Dan lain-lain.</p>	Tertutup

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Gubernur Bank Indonesia	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 3 Juli 2024.	Konsultasi Peraturan Bank Indonesia tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran BSBI.	Tertutup
5.	Rapat Internal Komisi XI	Rapat internal dilaksanakan tanggal 8 Juli 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi berkas dan pengesahan calon Anggota BPK RI yang lolos administrasi; 2. Dan lain-lain 	
6.	Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan	<p>Rapat kerja dilaksanakan tanggal 9 Juli 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendalaman Laporan Triwulan I Tahun 2024; 2. Rencana Tindak Lanjut LHP BPK tentang Sewa Gedung Wisma Mulia. 	<p>Komisi XI DPR RI dan Ketua DK OJK menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua DK OJK tentang Laporan Triwulan I Tahun 2024 dan tindak lanjut LHP BPK RI tentang sewa Gedung Wisma Mulia I. 2. OJK mempertajam kinerja OJK yang ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkualitas. 3. OJK menjaga kesehatan dan kinerja Industri Jasa Keuangan dalam mendukung sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. OJK dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum pada Industri Jasa Keuangan bermasalah memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. 5. OJK terus memperluas edukasi dan literasi keuangan. 6. OJK memastikan keamanan dan kerahasiaan data nasabah Industri Jasa Keuangan serta memperkuat ketahanan siber OJK. 7. OJK memperkuat kepatuhan Industri Jasa Keuangan dan pengaturan transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat 2a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 8. OJK merespon secara cepat, tepat, dan simpatik atas setiap aduan dari masyarakat atas permasalahan di Sektor Jasa Keuangan. 	

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>9. OJK menindaklanjuti LHP BPK tentang sewa Gedung Wisma Mulia I untuk memulihkan indikasi kerugian negara sebesar Rp394,1 Miliar dengan melakukan antara lain langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Membentuk tim OJK untuk menyelesaikan LHP BPK tentang sewa Gedung Wisma Mulia I. b) Mengkaji permasalahan indikasi kerugian negara sebagaimana LHP BPK tentang sewa Gedung Wisma Mulia I, untuk opsi menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum. Kajian paling lambat pada Triwulan III Tahun 2024. <p>10. OJK menyampaikan organisasi kerja, tata kerja organisasi, disertai formasi efektif SDM OJK.</p> <p>11. OJK akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU / PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	Rapat Badan Legislasi DPR RI, Rabu, 26 Juni 2024 pukul 13.37 WIB dengan agenda acara Penjelasan Pengusul RUU atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.	Menyepakati/menyetujui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU/Pimpinan Komisi II DPR RI dan seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat. 2. Pengharmonisasian secara lebih mendalam akan dilakukan oleh Panja. 3. Fraksi-Fraksi untuk segera menyampaikan nama-nama Anggota Panja kepada Sekretariat Badan Legislasi. 	
2.		Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI, Kamis, 27 Juni 2024 pukul 10.36 WIB dengan agenda acara Pembahasan hasil kajian harmonisasi.	Menyepakati/menyetujui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul RUU mengapresiasi dan dapat menerima hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan aspek teknis, substantif, dan asas-asas pembentukan perundang-undangan. 2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU, dan Anggota Panja Badan Legislasi akan menjadi bahan dalam menyempurnakan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi 	

NO	JUDUL RUU / PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>3. Pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat dijadwalkan pada Kamis, 27 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.</p>	
3.		<p>Rapat Badan Legislasi DPR RI, Kamis, 27 Juni 2024 pukul 13.09 WIB dengan agenda acara Pengambilan Keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.</p>	<p>Menyepakati/menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat; 2. Berdasarkan pandangan mini 9 (sembilan) Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP) yang telah disampaikan menyatakan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
4.	<p>RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025—2045</p>	<p>Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah, dan Komite IV DPD RI, Senin, 1 Juli 2024 Pukul 10.38 WIB dengan agenda acara Pengesahan rancangan jadwal dan mekanisme pembahasan.</p>	<p>Menyepakati/menyetujui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rancangan jadwal rapat dan mekanisme pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025--2045 dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jumlah DIM RUU hasil kompilasi fraksi-fraksi sebanyak 298 DIM dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a. DIM Tetap sebanyak 137 DIM; 	

NO	JUDUL RUU / PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			b. DIM Substansi sebanyak 98 DIM; dan c. DIM Perubahan Redaksional sebanyak 63 DIM. 3. DIM RUU yang bersifat tetap langsung disetujui, adapun untuk DIM RUU yang bersifat perubahan redaksional akan dibahas dalam Timus/Timsin dan perubahan substansi dibahas dalam Panja. 4. Rapat Panja dijadwalkan pada hari Selasa, 2 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.	
5.		Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah, dan Komite IV DPD RI, Selasa, 2 Juli 2024 Pukul 10.52 WIB dengan agenda acara Pembahasan DIM.	1. Rapat Panja membahas DIM yang bersifat substantif di mulai dari DIM Nomor 1, 3, 4, dst sampai dengan DIM Nomor 78; 2. Rapat Panja diskorsing dan dilanjutkan pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.	
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Rapat Panja Badan Legislasi, Senin, 8 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB dengan agenda acara penyempurnaan draft RUU yang telah disesuaikan oleh Pengusul RUU atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.	1. Pembahasan terhadap DIM yang bersifat Substantif dilanjutkan di mulai dari DIM Nomor 79, 80, 85, dst, sampai dengan DIM Nomor 265 dan pembahasan terhadap DIM yang dipending; 2. Panja menugaskan untuk menugaskan Timus/Timsin membahas DIM yang bersifat perubahan redaksional.	
7.		Rapat Panja Badan Legislasi, Senin, 8 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB dengan agenda acara penyempurnaan draft RUU	Menyetujui/menyepakati: 1. Panja mengapresiasi penyempurnaan yang telah dibuat/disusun oleh pengusul dengan menambahkan masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Panja;	

NO	JUDUL RUU / PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		yang telah disesuaikan oleh Pengusul.	2. Pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diadwalkan pada hari Senin, 8 Juli 2024 pukul 13.00 WIB.	
8.		Rapat Badan Legislasi, Senin, 8 Juli 2024 pkl 13.00 WIB dengan agenda acara Pengambilan Keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi	Menyepakati/menyetujui: 1. Menerima Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; 2. Berdasarkan pandangan mini 9 (sembilan) Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP) yang telah disampaikan menyatakan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden	Rapat Badan Legislasi (Rapat bersifat tertutup), Senin, 8 Juli 2024 pukul 13.50 WIB dengan agenda acara Presentasi Tim Ahli Baleg atas Penyusunan.	Menyepakati/menyetujui: 1. Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden akan dilakukan secara lebih mendalam pada tingkat Panja; 2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan Panja dalam penyempurnaan penyusunan RUU; 3. Fraksi-Fraksi untuk segera menyampaikan nama-nama Anggota Panja kepada Sekretariat Badan Legislasi dan Rapat Panja diadwalkan pada hari Selasa, 9 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.	

NO	JUDUL RUU / PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.		Rapat Panja Badan Legislati (Rapat Bersifat Tertutup), Selasa, 9 Juli 2024 pukul 11.06 WIB dengan agenda acara Penyusunan.	Menyepakati/menyetujui: Pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dijadwalkan pada Selasa, 9 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.	
11.		Rapat Kerja Badan Legislati, Selasa, 9 Juli 2024 pukul 15.03 WIB dengan agenda acara Pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Laporan Ketua Panja atas penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. 2. Berdasarkan pandangan 9 (sembilan) Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PKS, F-PGerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PAN, dan F-PPP) yang telah disampaikan menyatakan menyetujui hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
12.	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025—2045	Rapat Timus/Timsin Badan Legislati (Rapat Bersifat Tertutup), Rabu, 10 Juli 2024 pukul 10.23 WIB dengan agenda acara Pembahasan hasil matrik persandingan.	Hasil kerja Timus/Timsin akan disampaikan pada Rapat Panja Badan Legislati yang dijadwalkan pada hari Rabu, 10 Juli 2024 pukul 19.00 WIB.	
13.		Rapat Panja Badan Legislati (Rapat Bersifat Tertutup), Rabu, 10 Juli 2024 pukul 18.48 WIB dengan agenda acara Laporan Ketua Timus/Timsin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan Ketua Timus/Timsin RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025—2045. 2. Menugaskan Tim Ahli dari DPR, Pemerintah, dan DPD RI untuk merapihkan dan menyesuaikan draf RUU sebagaimana hasil dari Timus/Timsin sebagai bahan Rapat Panja yang akan datang. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB Makedonia dilaksanakan pada 25 Juni 2024	Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Makedonia menggelar rapat internal di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (25/6/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota GKSB Dra. Wenny Haryanto, SH (F-PG) dan Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., M.A.	
2.	KSB - BKSAP	Rapim BKSAP ke-45 dilaksanakan pada 25 Juni 2024.	<p>Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F-PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-45 secara <i>hybrid</i> pada hari Rabu (25/06/2024).</p> <p>Turut hadir secara fisik jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Putu Supadma Rudana (F-PD), serta hadir secara virtual Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan Dr. Sukamta (F-PKS).</p> <p>Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di Masa Persidangan V, khususnya partisipasi BKSAP dalam Komite Eksekutif PUIC, IPU <i>Youth-Parliamentarians</i>, dan Komite <i>Middle-East</i> IPU. Dibahas pula persiapan penyelenggaraan sidang IPPP-2 dan Forum Parlemen dalam Indonesia – Africa Forum pada tahun 2024.</p> <p>Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat, Tamu - Tamu Parlemen dan kunjungan diplomasi perorangan guna memaksimalkan berbagai program kerja BKSAP di masa persidangan mendatang.</p>	
3.	KSB - BKSAP	Pimpinan BKSAP DPR RI bersama Pimpinan Kom. II & III menerima Delegasi Komisi Pembangunan Politik	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Syamsurizal (F-PPP) menerima Delegasi Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa dan Partisipasi Publik <i>House of</i>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Parlemen Thailand dilaksanakan pada 26 Juni 2024.	<p><i>Representatives of Kingdom of Thailand</i> yang dipimpin oleh Hon. Mr. Parit Wacharasindhu di Gedung Nus III Lt.2 (26/06/24).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut kedua pihak bertukar pengalaman dan praktik terbaik terkait pembangunan politik, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, pemilu, sistem politik dan kerja sama antar-parlemen di tingkat regional dan internasional.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP menyambut baik kunjungan delegasi tersebut dan berharap kedepannya agar kerja sama kedua negara dapat terus meningkat dan memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat kedua negara.</p>	
4.	KSR - BKSAP	<i>BKSAP Day</i> di Batam: “Peran Diplomasi Parlemen dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan” dilaksanakan pada 1 Juli 2024.	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI - Putu Supadma Rudana (F-PD) bersama Pimpinan BKSAP lainnya Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Sukamta (F-PKS), Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Anggota BKSAP Arzeti Bilbina (F-PKB), Muslim (F-PD), Hasani bin Zuber (F-PD) dan Bapak Asman Abnur (F-PAN) melakukan diskusi interaktif dengan mahasiswa dan civitas akademika <i>Batam Tourism Polytechnic</i> (BTP) dan Institut Teknologi Batam (ITEBA) dalam rangkaian kegiatan <i>BKSAP Day</i> bertajuk “Peran Diplomasi Parlemen dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan” di Batam (Senin, 01/07/2024).</p> <p>Dalam paparannya, Putu Supadma Rudana menjelaskan peran diplomasi parlemen dalam mendukung promosi pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan menekankan pentingnya sustainable tourism pasca pandemi COVID-19. Lebih jauh, Putu menjelaskan bagaimana diplomasi parlemen dapat mendukung upaya pariwisata berkelanjutan melalui kerja sama internasional dan promosi pariwisata Indonesia di forum-forum parlemen regional seperti AIPA.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari mahasiswa seputar peluang kerja di bidang pariwisata hijau dan peran generasi muda dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang kemudian ditutup dengan foto bersama dan pertukaran cinderamata.	
5.	KSI - BKSAP	<i>The 1st P20 Meeting of Women Parliamentarians</i> di Marceio, Brazil dilaksanakan pada 1-2 Juli 2024.	<p>Anggota BKSAP DPR RI Vanda Sarundajang memimpin Delegasi BKSAP menghadiri Sidang <i>the 1st P20 Meeting of Women Parliamentarians</i> pada tanggal 1-2 Juli 2024 di Maceio, Brazil.</p> <p>Pertemuan membahas tiga isu terkait perubahan iklim, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.</p> <p>Delegasi BKSAP DPR RI secara garis besar menekankan bahwa kebijakan terkait ekonomi hijau harus responsif gender, apalagi perempuan lebih rentan terdampak perubahan iklim.</p> <p>Selain itu, delegasi BKSAP DPR RI menyoroti pentingnya partisipasi perempuan untuk mengatasi isu seperti kekerasan dan kemiskinan, serta tindakan untuk memperkuat ekonomi perempuan, termasuk melalui pendidikan.</p> <p>Delegasi BKSAP DPR RI juga mengingatkan kembali bahwa serangan Israel di Gaza dapat menghambat tercapainya kesetaraan gender.</p> <p>Sidang tersebut turut dihadiri oleh anggota BKSAP lainnya yaitu Dewi Coryati (F-PAN), Linda Megawati (F-PD), Ratih Megasari Singkaru (F-PNasdem), and Andi Muawiyah Ramly (F-PKB).</p>	
6.	KSB – BKSAP	<i>Working Lunch</i> dengan Perwakilan <i>Friedrich-Ebert Stiftung (FES) Indonesia</i>	Pimpinan BKSAP DPR RI mengadakan <i>Working Lunch</i> dengan Perwakilan <i>Friedrich-Ebert Stiftung (FES) Indonesia</i> yang dipimpin oleh Ms. Brigitte Juchems, <i>Resident Director FES Indonesia</i> . (03/07/2024).	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada 3 Juli 2024.	<p>Dalam kegiatan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI menyambut baik rencana FES Indonesia guna mengadakan program kerja sama dengan BKSAP DPR RI, khususnya dalam <i>capacity building</i> bagi Anggota Parlemen Muda. Pihak FES juga membuka kesempatan terkait kerja sama dalam peningkatan partisipasi anak muda dalam politik. Selain itu dibahas pula upaya – upaya penguatan interaksi dan kerja sama antara DPR RI, FES Indonesia dan juga Bundestag (Parlemen Jerman).</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Dr. Sukamta (F-PKS).</p>	
7.	KSR - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Duta Besar Negara Pasifik dilaksanakan pada 3 Juli 2024.	<p>Jajaran Pimpinan BKSAP DPR RI menerima Duta Besar Papua Nugini, H.E. Mr. Simon Namis dan Counselor Kedutaan Besar Fiji, Hon. Mr. Solomon Momoivalu pada hari Rabu (03/07/2024).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menyampaikan komitmen penguatan hubungan antara Indonesia dengan Negara – Negara Pasifik melalui kerangka kerja sama antar-parlemen. Dalam upaya penguatan hubungan tersebut akan diadakan <i>2nd Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership</i> yang rencananya akan diadakan pada tanggal 25 – 26 Juli 2024.</p> <p>Duta Besar Papua Nugini dan <i>Counsellor</i> Kedutaan Besar Fiji menyambut baik penyelenggaraan <i>2nd IPPP</i> tersebut serta menyatakan bahwa pihak parlemen mereka akan berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. <i>2nd IPPP</i> dengan tema “<i>Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development</i>” bertujuan untuk menyambungkan kembali dan memperkuat kolaborasi antara Parlemen Indonesia dan Parlemen negara – negara Pasifik, yang sempat terkendala oleh Pandemi Covid-19.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan Putu Supadma Rudana (F-PD).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	KSB - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Dubes Palestina dilaksanakan pada 3 Juli 2024.	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) bersama Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta (F-PKS) menerima Duta Besar Negara Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Shun, Rabu (03/07/2024). Pertemuan tersebut membahas situasi terkini yang terjadi di Palestina serta menekankan kembali komitmen dan dukungan kekal Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Duta Besar Palestina mengapresiasi dukungan DPR RI yang telah aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada berbagai organisasi Parlemen Internasional serta berterima kasih atas berbagai dukungan dan bantuan masyarakat Indonesia. Kedepannya kedua pihak akan terus aktif bekerja sama dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina serta berupaya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina.	
9.	KSB - BKSAP	Audiensi Pimpinan BKSAP dengan <i>Aqsa Working Group</i> (AWG) dilaksanakan pada 3 Juli 2024.	Pimpinan BKSAP menerima <i>Aqsa Working Group</i> di Gedung Nusantara III Lt. 2 (03/07/2024). Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon (F-PGerindra) mengadakan audiensi dengan <i>Aqsa Working Group</i> . Dalam audiensi Pimpinan BKSAP memaparkan langkah – langkah yang telah diambil dalam berbagai organisasi parlemen internasional seperti IPU, PUIC, dan APA. Sebagai informasi, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta (F-PKS) merupakan anggota Komite Timur Tengah di IPU yang tengah mengupayakan kunjungan ke Gaza dan Rafah. BKSAP terus mengambil langkah aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak – hak rakyat Palestina.	
10.	KSB - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Komite Palestina PBB (CEIRPP) dilaksanakan pada 3 Juli 2024.	Pimpinan BKSAP DPR RI menerima <i>Delegasi UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People</i> (CEIRPP) yang dipimpin oleh H.E. Mr. Cheikh Niang, <i>Chair of the CEIRPP</i> (03/07/2024). Delegasi CEIRPP menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen, upaya dan dukungan kekal segala komponen Indonesia atas perjuangan kemerdekaan Palestina. DPR RI secara konsisten telah memberikan dukungan luar biasa	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>terhadap perjuangan bangsa Palestina pada berbagai organisasi parlemen internasional. Kedepannya, CEIRPP berharap agar DPR RI dapat terus menyuarakan kemerdekaan Palestina kepada parlemen – parlemen negara sahabat serta pada tingkat regional dan multilateral.</p> <p>Ketua BKSAP berterima kasih atas apresiasi yang diberikan CEIRPP kepada komitmen dan upaya Indonesia selama ini untuk kemerdekaan Palestina. Pihaknya juga menyampaikan diplomasi parlemen merupakan komponen penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Palestina, guna mendorong parlemen - parlemen negara sahabat agar pemerintah mereka dapat mengakui Palestina sebagai negara.</p>	
11.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB Thailand dilaksanakan pada 8 Juli 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Thailand menggelar rapat internal secara <i>hybrid</i> di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/7/2024). Rapat tersebut membahas sejumlah hal terkait upaya memperkuat kerja sama antar Parlemen.</p> <p>Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Thailand (F-PGerindra), serta Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Thailand H. Mustafa Kamal, S.S (F-PKS) dan Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si (F-PKS).</p>	
12.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua BKSAP dengan Duta Besar Thailand untuk Indonesia dilaksanakan pada 8 Juli 2024.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menerima Duta Besar Thailand untuk Indonesia, H.E. Mr. Prapan Disyatat di Gedung Nusantara III Lt. 2 (08/07/2024).</p> <p>Duta Besar Thailand untuk Indonesia berterima kasih atas penerimaan yang hangat oleh Ketua BKSAP serta menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang telah aktif dalam meningkatkan hubungan bilateral RI – Thailand. Komitmen kedua parlemen ditunjukkan dengan intensnya saling kunjung dan diskusi oleh delegasi parlemen kedua secara bilateral dan dalam organisasi parlemen internasional seperti AIPA, SEAPAC dan IPU.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pada tahun 2025, kedua negara akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik yang kiranya dapat menjadi momentum yang baik bagi RI dan Thailand untuk terus meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang khususnya kerja sama antar-parlemen, ekonomi, pertanian, politik, serta keamanan dan stabilitas kawasan asia tenggara. Kedepannya, kedua pihak juga sepakat untuk terus bekerja sama dalam mendukung proses perdamaian dan transisi demokrasi di Myanmar.</p>	
13.	KSB - BKSAP	Audiensi Ketua BKSAP DPR RI dengan PGMNI dilaksanakan pada 8 Juli 2024.	<p>Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon menerima audiensi dari jajaran Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada siang ini (8/7/2024).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PGWNI Hery Sudrajat menyoroti berbagai isu terkait kesejahteraan dan pengakuan guru madrasah. Disampaikan bahwa PGWNI telah membentuk perwakilan di 32 provinsi. Pertemuan ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan dukungan guru madrasah di Indonesia.</p>	
14.	KSI - BKSAP	FGD <i>“Africa in Today’s World, Where is Indonesia?”</i> dilaksanakan pada 8 Juli 2024.	<p>BKSAP DPR RI bersama KBRI Addis Ababa melaksanakan seminar internasional dan diskusi yang bertajuk <i>“Africa in Today’s World: Where is Indonesia?”</i>, Senin (08/07/2024). Seminar yang dilaksanakan secara hybrid dari Gedung DPR RI dan KBRI di Addis Ababa ini merupakan rangkaian persiapan pelaksanaan <i>Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF)</i> yang akan digelar September mendatang.</p> <p>Hadir sebagai <i>Keynote Speaker</i>, Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia dan Afrika memiliki kedekatan historis sebagai bagian penting dari Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok. Fadli menambahkan saat ini perekonomian negara-negara Afrika tumbuh pesat menjadi kekuatan ekonomi yang layak diperhitungkan, serta memiliki potensi dibidang sumber daya mineral dan memiliki populasi pemuda yang besar.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dr. Fadli Zon menyampaikan pandangannya selaku salah satu <i>keynote speaker</i> bahwa selama ini Indonesia hanya menjadi penonton di barisan belakang terkait dengan isu Afrika, kini sudah saatnya Indonesia mengambil peran strategis dan mempererat kerja sama dengan Benua Afrika guna menguatkan posisi geostrategis Indonesia di kawasan ini dan juga secara global.</p> <p>Dalam seminar ini turut sebagai pembicara adalah Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti, dan Uni Afrika, Al Busyra Basnur, dan wakil hubungan luar negeri Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Bernardino Vega. Sebagai panelis hadir Dr. Lawalley Cole dari Uni Afrika, Dewi Justicia Meidiwaty dari Kementerian Luar Negeri RI, Mintardjo Halim dari KADIN, Taufan Teguh Akbari, Ph.D dari LSPR <i>Institute Communication & Business</i>, Dr. Bekele Shibru dari Harambee University, Irfan Wahyudi, Ph.D dari Universitas Airlangga, dan Kemal Abdella dari O-Yes Global Foundation.</p> <p>Turut hadir dalam acara ini Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) dan Anggota BKSAP Adde Rosi Khoerunnisa dan Ravindra Airlangga (F-Golkar). Serta Presiden dan anggota <i>Indonesian Student Association for International Studies</i> (ISAFIS).</p>	
15.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB Rusia dilaksanakan pada 9 Juli 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Rusia mengadakan rapat internal secara di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, siang ini (9/7/2024). Rapat membahas berbagai hal terkait rencana kunjungan parlemen dalam waktu dekat.</p> <p>Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Rusia Dr. Ir. Adies Kadir (F-PGolkar, serta Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Rusia N.M. Dipo Nusantara (F-PKB) serta perwakilan My Esti Wijayati (F-PDIP) dan Paramita Widya Kusuma (F-PDIP).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
16.	KSB - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Duta Besar Filipina untuk ASEAN dilaksanakan pada 9 Juli 2024.	Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) bersama Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana (F-PD) menerima Duta Besar Filipina untuk ASEAN, H.E. Mrs. Hjayceelyn Mancenido Quintana. (09/07/2024). Dalam pertemuan tersebut Pimpinan BKSAP menyampaikan bahwa ASEAN memiliki peranan penting bagi pembangunan dan keamanan Indonesia dan Filipina. Kedua pihak memandangi stabilitas dan keamanan ASEAN menjadi prioritas bagi kedua negara demi kesejahteraan kawasan. Sebagai pelopor demokrasi di kawasan Asia Tenggara, kedua pihak menilai pentingnya Indonesia dan Filipina untuk menjaga dan mengawal transisi demokrasi di Myanmar. Selain itu, Indonesia dan Filipina perlu terus bekerja sama dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan di Laut Cina Selatan.	
17.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB Australia dilaksanakan pada 9 Juli 2024.	Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Australia menggelar rapat internal di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024). Rapat tersebut membahas berbagai hal yang berkaitan dengan upaya memperkuat kerja sama antar parlemen. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Australia - I Nyoman Parta, SH (F-PDIP), serta Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Australia Ravindra Airlangga (F-PGolkar) dan Dra. Delmeria Sikumbang (F-PNasdem).	
18.	KSR - BKSAP	<i>BKSAP Day</i> Yogyakarta: “Diplomasi Parlemen dan Budaya dalam Memperkuat Hubungan Internasional dan Promosi Warisan Budaya” dilaksanakan pada 10 Juli 2024.	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD), memimpin Delegasi BKSAP dalam kegiatan <i>BKSAP Day</i> bertajuk “Diplomasi Parlemen dan Budaya dalam Memperkuat Hubungan Internasional dan Promosi Warisan Budaya” di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada Rabu (10/07/2024). Diskusi dengan komunitas akademik dan mahasiswa yang menyoroti potensi diplomasi budaya melalui dukungan diplomasi parlemen dan kemitraan strategis ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez (F-	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>PDIP) dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN); serta Anggota BKSAP Puteri Komaruddin (F-P.Golkar), Ratih Megasari Singkarru (F-P.Nasdem), Linda Megawati (F-P.Demokrat), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-P.Demokrat).</p> <p>Dalam paparannya, Putu S. Rudana menekankan pentingnya memanfaatkan kekayaan budaya Indonesia sebagai instrumen <i>soft power</i> dalam kerangka diplomasi budaya. “13 warisan budaya kita telah diakui UNESCO, yang di tahun 2017 mengakui Indonesia sebagai negara super-power dalam bidang budaya. Hal ini harus menjadi aset bagi diplomasi kita,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bagaimana diplomasi parlemen dapat mendukung penguatan diplomasi budaya melalui kerja sama dan promosi budaya di berbagai forum parlemen.</p> <p>Diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif mencakup berbagai topik, termasuk kebebasan berekspresi, dukungan bagi seniman, dana abadi kebudayaan, dan potensi ekonomi kreatif dari sektor seni. Delegasi BKSAP secara kolektif menekankan agar dialog antara parlemen dengan pelaku seni budaya dapat menjadi katalisator bagi peningkatan afirmasi dan dukungan politik bagi seni budaya secara berkelanjutan.</p>	
19.	KSI - BKSAP	Pertemuan Delegasi BKSAP DPR RI dengan Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia dilaksanakan pada 11 Juli 2024.	<p>Dr. Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds dan Palestina menegaskan komitmennya sebagai perwakilan parlemen global di forum tersebut untuk menggalang dukungan parlemen, utamanya di tingkat regional yaitu Asia Tenggara melalui berbagai upaya lobi dan diplomasi parlemen.</p> <p>Hal ini disampaikan Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dalam pertemuan dengan Parlemen Malaysia yang dipimpin Syed Ibrahim (Ketua Kaukus Parlemen Malaysia untuk Palestina) di Gedung Parlemen Malaysia (11/07).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Ia juga menyatakan dukungan atas pembentukan “Parlemen Asia Tenggara untuk Kemerdekaan Palestina” yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi parlemen Asia Tenggara dalam mengoptimalkan diplomasi melalui lobi, kampanye, dan dialog untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Fadli Zon didaulat sebagai Penasehat dalam Forum ini mewakili organisasi parlemen dunia untuk Palestina sekaligus DPR RI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	PT Asuransi Jasindo	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 24-27 Juni 2024 ke Jayapura, Papua.	<p>Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit <i>provider</i> belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit <i>provider</i> dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
2.	Kunjungan Kerja	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka keprotokolan bandara di Makassar, Sulawesi Selatan, 28-30 Juni 2024.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di Bandara Makassar untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di bandara agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	PT Asuransi Jasindo	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 1-3 Juli 2024 ke Semarang, Jawa Tengah.	<p>Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan keluarganya bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit <i>provider</i> dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit <i>provider</i> belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit <i>provider</i> dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
4.	Kunjungan Kerja	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka keprotokolan di Bandara: 1) Bali, 4-7 Juli 2024. 2) Surabaya, 8-11 Juli 2024.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di Bandara Makassar untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di bandara agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar. 	
